



# LAPORAN KINERJA DIREKTORAT IKAN AIR LAUT TRIWULAN III 2024



DIREKTORAT IKAN AIR LAUT  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I. PENDAHULUAN.....	12
1.1. Latar Belakang.....	12
1.2. Maksud dan Tujuan.....	13
1.3. Tugas dan Fungsi.....	13
a. Sumber Daya Manusia.....	14
b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya.....	15
c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	16
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	17
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budidaya.....	17
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024.....	18
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	24
<b>SS.1. Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya bidang Ikan Air Laut..</b>	<b>24</b>
IKU 1 Tenaga kerja yang terlibat di bidang ikan air laut (orang).....	24
<b>SS.2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budidaya yang direvitalisasi.....</b>	<b>25</b>
IKU 2 Kluster tambak yang siap operasional (Kluster).....	25
IKU 3 Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)....	27
IKU.4 Kawasan perikanan budidaya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan).....	29
<b>SS.3. Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.....</b>	<b>30</b>
IKU.5 Persentase sarana kawasan budidaya yang dimanfaatkan masyarakat (%)... 30	
IKU.6 Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (paket).....	32
<b>SS 4. Meningkatnya kualitas pengendalian kesehatan ikan.....</b>	<b>33</b>
IKU 7. Presentase NSPK bidang kesehatan ikan yang disusun (%).....	33
IKU 8. Tingkat kualitas implementasi <i>National Residu Monitoring Plan</i> (%).....	35

IKU 9. Indeks pengendalian penyakit ikan (skala).....	38
IKU 10. Persentase bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) .....	41
<b>SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut .....</b>	<b>41</b>
IKM.11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%).....	44
IKM. 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) .....	44
IKM.13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut(%) .....	46
IKM.14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%).....	47
IKM.15. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%).....	48
IKM.16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan (%) .....	49
IKM.17. Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%).....	53
IKM.18. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%) .....	54
IKM.20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut (%).....	55
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut Pasca Transformasi Jabatan Fungsional Tahun 2023 .....	14
Gambar 2. Potensi Perikanan Budi Daya .....	15
Gambar 3. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024 .....	17
Gambar 4. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024 .....	18
Gambar 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 .....	19
Gambar 6. <i>Screenshot</i> NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerja Triwulan III Tahun 2024 .....	20
Gambar 7. Formulasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan di setiap unit organisasi Direktorat Kawasandan Kesehatan Ikan Tahun 2024.....	13
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 .....	22
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Ikan Air Laut (orang) Triwulan III Tahun 2024.....	25
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) Triwulan III Tahun 2024.....	26
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) Triwulan III Tahun 2024 .....	28
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) Triwulan III Tahun 2024.....	30
Tabel 7. Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi.....	30
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) Triwulan III Tahun 2024 .....	32
Tabel 9. Daftar Excavator yang telah Didistribusikan ke Masyarakat Hingga Triwulan III Tahun 2024.....	32
Tabel 10. Capaian Indikator Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (paket) Triwulan III Tahun 2024 .....	35
Tabel 11. Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) TA. 2024.....	36
Tabel 12. Rekap BAST Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) TA. 2024.....	36
Tabel 13. Rincian Target Jumlah Dokumen NSPK Bidang Kesehatan Ikan Tahun 2024 .....	37
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%).....	38
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%).....	38
Tabel 16. Judul dan Konseptor Rapat Teknis RSNI 3 bidang Kesehatan Ikan 2024.....	39
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi National Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) Triwulan III Tahun 2024 .....	40
Tabel 18. Rincian target dan realisasi sampel monitoring residu di 26 Provinsi pada Triwulan III Tahun 2024 ..	41
Tabel 19. Skala Penentuan Indeks Pengendalian Penyakit Ikan (Skala).....	43
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Indeks Serangan Penyakit ikan (Skala) Triwulan III Tahun 2024 .....	43
Tabel 21. Rincian Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan di 34 Provinsi pada Triwulan III Tahun 2024.....	44
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Triwulan III Tahun 2024 .....	46
Tabel 23. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Triwulan II Tahun 2024 di 15 UPT-DJPB.....	46
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan III Tahun 2024 .....	49
Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) Triwulan III Tahun 2024.....	51
Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%) Triwulan III Tahun 2024 .....	52
Tabel 27. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	

Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%) Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2024.....	52
Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%) Triwulan III Tahun 2024.....	54
Tabel 29. Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Triwulan III Tahun 2024.....	55
Tabel 30. Capaian Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Triwulan III Tahun 2024.....	56
Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut (%) Triwulan III Tahun 2024.....	56
Tabel 32. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024.....	57
Tabel 33. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024.....	58
Tabel 34. Rincian Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Triwulan III Tahun 2024.....	58
Tabel 35. Data Transaksi Persediaan Untuk Periode Triwulan III Tahun 2024.....	59
Tabel 36. Layanan Rapat Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024.....	59
Tabel 37. Capaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Triwulan III Tahun 2024.....	60
Tabel 38. Capaian Indikator Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi) Triwulan III Tahun 2024.....	61
Tabel 39. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 ..	62
Tabel 40. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut.....	63

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerjasama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Laut, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik.

LKj Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Laut. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Laut sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang.

Jakarta 20 Oktober 2024

**Direktur Ikan Air Laut**

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom, separated by two small stars. The inner ring contains 'DIREKTORAT PENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Tinggal Hermawan, S.Pi, M.Si**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 merupakan hasil penilaian dan evaluasi capaian kinerja dan sasaran untuk mengukur pencapaian kinerja dan sasaran selama Triwulan III Tahun 2024, yang juga merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut.

Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Berikut rincian capaian Indikator Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024:

- a) Terdapat 4 (empat) Indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Strategi yang capaiannya telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, yaitu:
  - SS4. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan**, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu : Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%);
  - SS5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Laut**, dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: (i) Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%), (ii) Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) dan (iii) Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%).
- b) Terdapat 1 (satu) Indikator kinerja dari 1 (satu) Sasaran Strategi yang capaiannya dibawah target tahunan yang ditetapkan, yaitu:
  - SS5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut.
- c) Terdapat 2 (dua) Indikator kinerja dari 2 (dua) Sasaran Strategi yang capaiannya sama dengan target tahunan yang ditetapkan, yaitu:
  - SS2. Meningkatkan Kawasan Perikanan Budi daya yang Direvitalisasi**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan);
  - SS3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Saluran irigasi tambak yang Direhabilitasi (Paket).
- d) Terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja dari 5 (lima) Sasaran Strategi yang capaiannya belum dapat diukur pada triwulan III, yaitu:
  - SS1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi daya meningkat di Direktorat Ikan Air Laut** dengan

1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Tenaga kerja yang terlibat di bidang Ikan Air Laut (Orang).

**SS2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi** dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu : (i) Kluster tambak yang siap operasional (Kluster), dan (ii) Kawasan budidaya yang direncanakan saluran irigasinya (kawasan).

**SS3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan**, dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan masyarakat (%).

**SS4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan**, dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: (i) Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%), (ii) Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala) dan (iii) Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%)

**SS5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan**, dengan 5 (lima) indikator kinerja) yaitu : (i) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen), (ii) Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai), (iii) Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%), (iv) Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) dan (v) Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%).

Berdasarkan capaian di atas, diketahui bahwa 21,05% Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, 5,26% Indikator Kinerja di bawah target yang ditetapkan, 10,53% Indikator Kinerja sama dengan target yang ditetapkan dan 63,16 % Indikator Kinerja yang capaiannya belum dapat diukur pada Triwulan III. Sehubungan dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 maka perolehan Nilai Pengukuran Sasaran Strategi (NPSS) mencapai kategori “**Baik**” dengan nilai 109,49. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

1. **IKU 4. Kawasan Perikanan Budi Daya Yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)**, telah diselesaikannya pekerjaan rehalitasi saluran yang dapat mengairi lahan ytambak seluas 458 Ha.
2. **IKU 5. Persentase Sarana Kawasan Budi daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%)**, telah disalurkaninya excavator sebanyak 56 unit kepada kelompok penerima di 56 Kabupaten yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima barang (BAST).
3. **IKU 6. Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)**, telah diselesaikannya penyaluran pekerjaan rehabilitasi saluran irigasi sebanyak 10 Paket di 8 Kabupaten yang dilengkapi dengan BAST dengan saluran sepanjang 11.250,3 m.’
4. **IKU 7. Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%)**, telah dihasilkannya 7 (tujuh) dokumen NSPK di bidang Kesehatan Ikan yang berkaitan dengan bidang pengendalian *Anti Microbial Resistance* (AMR) dan Residu dalam bentuk : produk hukum berupa Keputusan Dirjen Perikanan Budidaya dan Perubahan Peraturan Menteri KP bidang residu serta dokumen RSNI 3.
5. **IKM 12. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang**

**Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%)**, telah dilakukan penyelesaian sebagian temuan Inspektorat Jenderal namun masih perlu tindak lanjut LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 pada Satker Direktorat Ikan Air Laut terkait dengan kelengkapan bukti dukung terhadap sisa temuan (satu temuan dengan satu saran dan nilai keuangan Rp41.426.478,00).

6. **IKM 14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%)**, telah disampaikannya penyebarluasan informasi menggunakan platform Portal Collaboration Office secara rutin.
7. **IKM 16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)**, telah dilakukan upaya peningkatan layanan ketatausahaan di Direktorat Ikan Air Laut.
8. **IKM 17. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut (%)**, telah dilakukan upaya dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran terutama pada kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat.

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budi daya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budi Daya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budi daya, lebih lanjut dituangkan dalam buku Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budi Daya 2020 - 2024.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budi daya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budi daya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budi daya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, Direktorat Ikan Air Laut telah menetapkan target kinerja tahun 2024, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun, kemudian dituangkan dalam LKj Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

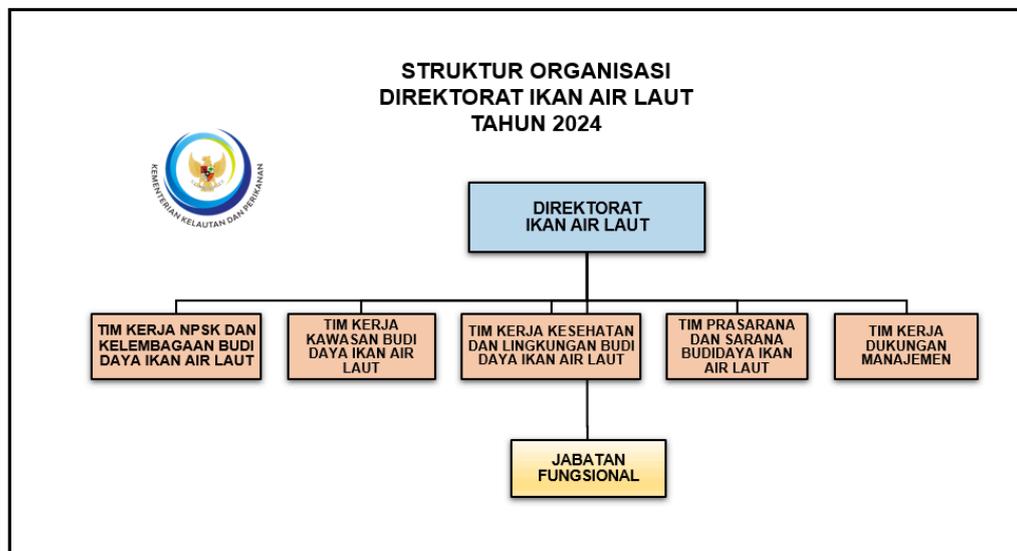
## 1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Ikan Air Laut. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Triwulan III Tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Laut selama Triwulan III Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kebijakan perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

## 1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020, maka Tugas Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air laut. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut;
- 2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi pemanfaatan dan perikanan pengelolaan budi daya, kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut;
- 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air laut; dan
- 5) pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Laut.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Laut**

### a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Direktorat Ikan Air Laut didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, sebagaimana terdapat pada Tabel 1. Kualifikasi sumberdaya di Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pendidikan S3 sebanyak 1,96%, S2 sebanyak 17,64%, S1 sebanyak 74,51%, D3 sebanyak 1,96%, SMA sebanyak 1,96% dan SMP sebanyak 1,96%.

**Tabel 1. Jumlah SDM berdasarkan jenjang pendidikan di setiap unit organisasi Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024**

No.	Nama Organisasi	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Direktur	-	1	-	-	-	-	1
2	Tim Kerja Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut	-	3	9	-	-	-	12
3	Tim Kerja Prasarana dan Sarana Kawasan Budi Daya	-	2	7	-	-	-	9
4	Tim Kerja Kesehatan dan Lingkungan Budi Daya Ikan Air Laut	-	2	7	-	-	-	9
5	Tim Kerja NSPK dan Kelembagaan	-	3	4	-	-	-	7
6	Tim Kerja Dukungan Manajemen	-	-	4	2	6	-	12
7	Pengawas Perikanan Utama	1	-	-	-	-	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>51</b>

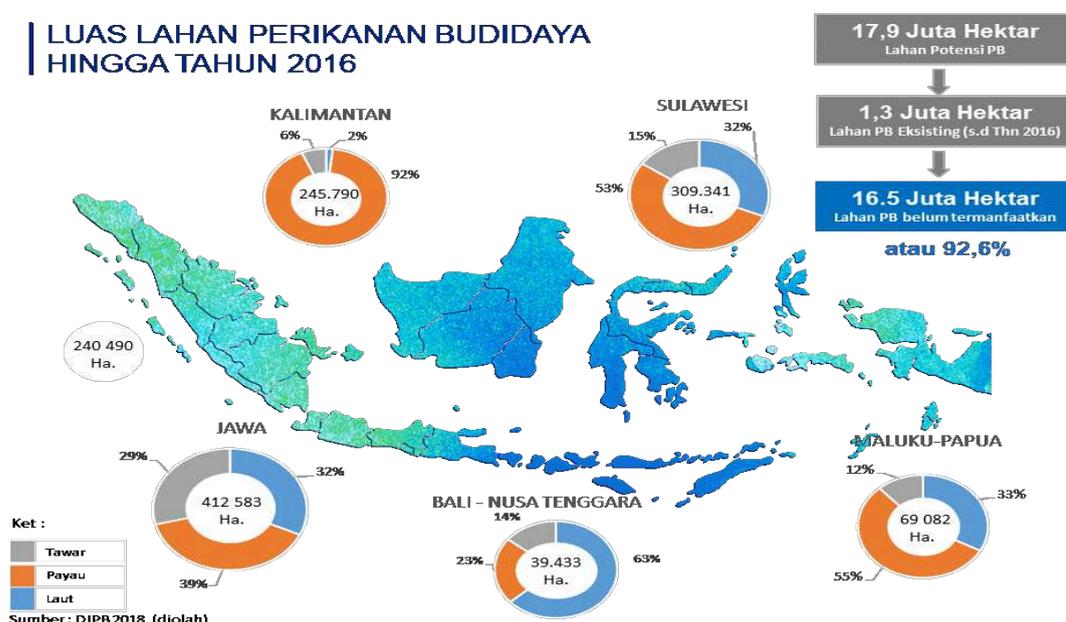
Keseluruhan jumlah pegawai di Direktorat Ikan Air Laut mencapai 51 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil 40 orang,
- b. Pegawai PPPK 4 orang dan
- c. Pegawai Tenaga Kontrak 7 orang.

Pegawai tenaga kontrak di Direktorat Ikan Air Laut tersebar di Timja Dukungan Manajemen sebanyak 3 (tiga) orang, Timja Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut sebanyak 2 (dua) orang, dan Tim Kerja Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan Air Laut sebanyak 2 (dua) orang.

## b. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Potensi lahan perikanan budi daya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budidaya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta Ha (sumber: Review Masterplan Perikanan Budi daya Tahun 2014). Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.



**Gambar 2. Potensi Perikanan Budi daya**

Permasalahan yang dihadapi dalam perikanan budi daya secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang dihadapi meliputi: (i) terbatasnya ketersediaan benih dan induk yang bermutu dan berkualitas, (ii) harga pakan masih dikontrol oleh pasar karena ketersediaan pakan yang berkualitas dan

bermutu dengan harga terjangkau masih terbatas, (iii) potensi bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan ikan di masyarakat (kelompok GERPARI) belum optimal dimanfaatkan sehingga masih bergantung pada impor; (iv) keterbatasan pengetahuan SDM pelaku usaha perikanan budi daya, (v) keterbatasan akses permodalan untuk usaha perikanan budi daya; (vi) manajemen pengelolaan lingkungan dan penyakit ikan yang belum optimal; (vii) implementasi cara berbudidaya ikan yang baik (pembesaran, pembenihan dan pembuatan pakan mandiri) belum optimal diimplementasikan oleh pelaku usaha perikanan budi daya; dan kondisi infrastruktur yang belum optimal mendukung pengembangan usaha perikanan budi daya secara efisien.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan perikanan budi daya meliputi: (i) tidak adanya kepastian ruang untuk usaha perikanan budi daya, (ii) adanya asimetrik regulasi dan perizinan inter dan intra sektoral yang menghambat pengembangan usaha perikanan budi daya, (iii) adanya perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, dan (iv) belum adanya harmonisasi kebijakan, program dan anggaran antara pusat dan daerah serta inter dan intra sektoral.

### c. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

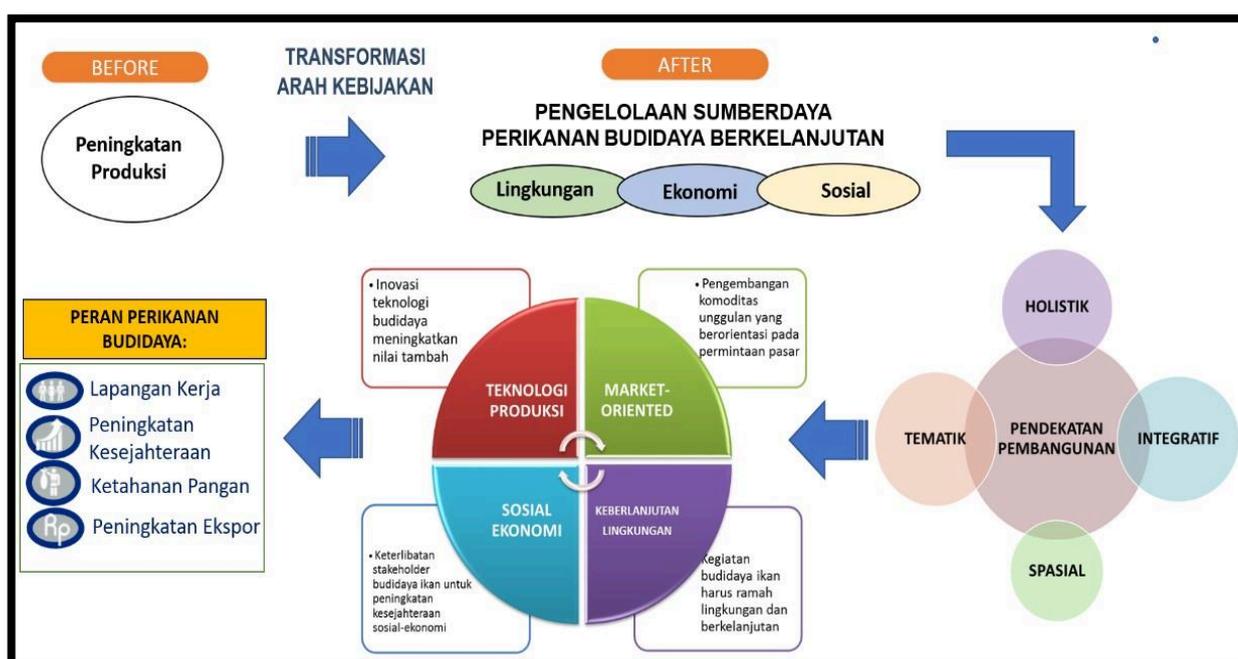
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKJ Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 selama kurun waktu Januari – Maret 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, keragaan sumber daya manusia (SDM), potensi dan permasalahan pembangunan perikanan budidaya serta sistematika penyajian laporan kinerja.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini menyajikan tentang Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Laut.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini menyajikan evaluasi dan analisis kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

## BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Budi Daya

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budi Daya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budi daya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budi daya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budi daya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budi daya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 2. Pendekatan Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budi Daya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut

kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut:



**Gambar 3. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budi Daya 2020-2024**

## 2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10941  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMARAN: [slp@k.kp.go.id](mailto:slp@k.kp.go.id), [slp@k.kp.go.id](mailto:slp@k.kp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tinggal Herdawan**  
Jabatan : **Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan**  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**  
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama  
Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan

Tb. Haeru Rahayu

Tinggal Herdawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	1. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (Orang)	680
		2. Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)	9
2.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	3. Kawasan budidaya yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)	1
		4. Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/ Irigasi (Kawasan)	8
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5. Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang dimanfaatkan Masyarakat (%)	75
		6. Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)	10
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	7. Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan (NRMP)</i> (Persen)	94
		8. Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (Persen)	75
		9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)	2
		10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan terhadap Antimikroba (Persen)	35
5.	Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	85
		12. Nilai PM SAKIP Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Nilai)	82
		13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
		14. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	
15.		Tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
16.		Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	80
17.		Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSLUKA (Persen)	91
18.		Data Geospasial yang Terintegrasi Bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)	1
19.		Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (Persen)	98

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	429,050,000,000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	678,640,000
<b>Total Anggaran Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024</b>		<b>429,728,640,000,-</b>

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama  
Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan

  
**Tb. Haeru Rahayu**

  
**Tinggal Hermawan**

**Gambar 4. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Tahun 2024**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya mengamanatkan Nomenklatur baru di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, maka Perjanjian Kinerja Dit.Kawasan dan Kesehatan Ikan mengalami penyesuaian menjadi Perjanjian Kinerja Dit. Ikan Air Laut sebagai berikut



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**  
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 1004  
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
 EMAIL: [ditjenperikanan@korpri.go.id](mailto:ditjenperikanan@korpri.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT IKAN AIR LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tinggal Hermawan**  
 Jabatan : **Direktur Ikan Air Laut**  
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**  
 Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**  
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua  
 Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama  
 Direktur Ikan Air Laut

Tb Haeru Rahayu

Tinggal Hermawan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terserapnya tenaga kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Laut	1. Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Ikan Air Laut (Orang)	164
2.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	2. Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster) 3. Kawasan budidaya yang direncanakan salurannya (Kawasan) 4. Kawasan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/ Irigasi (Kawasan)	9 1 8
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	5. Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) 6. Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)	75 10
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	7. Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan (NRMP)</i> (Persen) 8. Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Dausun (Persen) 9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala) 10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan terhadap Antimikroba (Persen)	94 75 2 35
5.	Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Direktorat Ikan Air Laut	11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen) 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (Persen) 14. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang	85 82 80 94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	
15.		Tingkat efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80
16.		Persentase Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	80
17.		Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
18.		Data Geospasial yang Terintegrasi Bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)	1
19.		Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	98

Data Anggaran:

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	418.102.250.000
2.	Dukungan Manajemen Lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.800.000.000
<b>Total Anggaran Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024</b>		<b>419.902.250.000</b>

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua  
 Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama  
 Direktur Ikan Air Laut

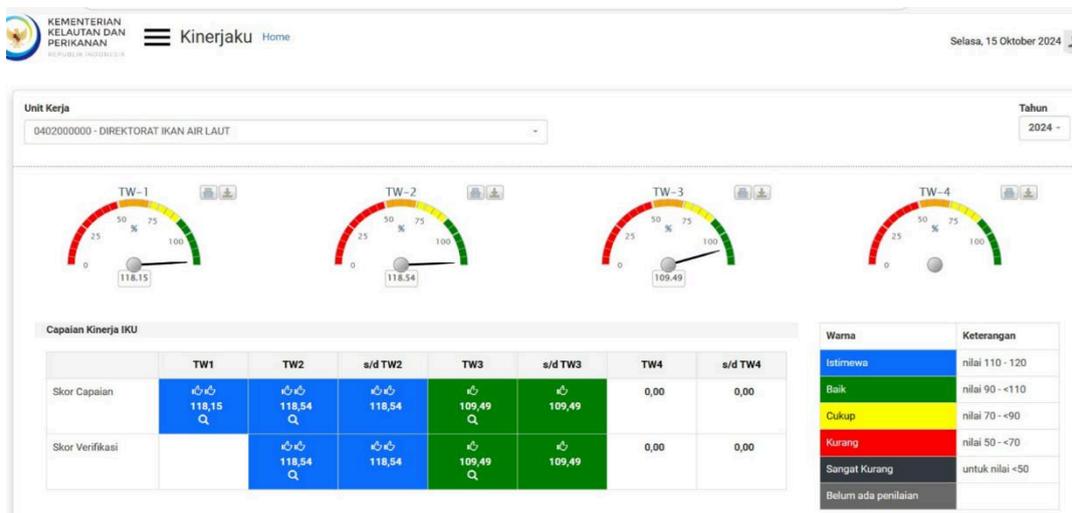
Tb Haeru Rahayu

Tinggal Hermawan

**Gambar 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Tahun 2024**

### 2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" dimana aplikasi ini merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 6. *Schreenshoot* NPSS Direktorat Ikan Air Laut pada Kinerjaku Triwulan III Tahun 2024

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan budidaya ikan air laut pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” terdapat 13 (tiga belas) indikator yang dapat diukur capaiannya secara tahunan, 1 (satu) indikator diukur capaiannya secara semesteran dan 5 (lima) indikator lainnya diukur secara triwulan. Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan III	%	Peng-Hitungan
1	<b>Terserapnya tenaga kerja sektor Perikanan Budi Daya bidang Ikan Air Laut</b>	1	Tenaga kerja yang terlibat di bidang Ikan Air Laut (Orang)	164	0	0	Tahunan
2	<b>Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang Direvitalisasi</b>	2	Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)	9	0	0	Tahunan
		3	Kawasan budi daya yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)	1	0	0	Tahunan
		4	Kawasan Perikanan Budi Daya yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)	8	8	100	Tahunan
3	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan</b>	5	Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan masyarakat (%)	75	0	0	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan III	%	Peng-Hitungan
		6	Saluran irigasi tambak yang Direhabilitasi (Paket)	10	10	100	Tahunan
4	Meningkatnya kualitas pengendalian Kesehatan Ikan	7	Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP) (%)	94	0	0	Tahunan
		8	Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)	75	100	>120	Triwulan
		9	Indeks Serangan Penyakit Ikan (Skala)	2	0	0	Tahunan
		10	Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resisten terhadap Antimikroba (%)	35	0	0	Tahunan
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut	11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Persen)	85	0	0	Semesteran
		12	Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)	82	0	0	Tahunan
		13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%)	80	88,57	110,71	Triwulanan
		14	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)	94	133,33	>120	Triwulan
		15	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)	80	0	0	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi Triwulan III	%	Peng-Hitungan
		16	Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)	80	99,44	>120	Triwulan
		17	Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)	91	0	0	Tahunan
		18	Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)	1	0	0	Tahunan
		19	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut	98	76,28	77,84	Triwulan

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### SS.1. Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya bidang Ikan Air Laut

Sasaran Strategis Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya meningkat di Direktorat Ikan Air Laut memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu:

##### **IKU 1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Ikan Air Laut (Orang)**

Indikator Tenaga Kerja yang terlibat di bidang Budi daya Ikan Air Laut (orang) didefinisikan Jumlah tenaga kerja langsung yang terlibat dalam kegiatan pembenihan ikan air laut sebanyak 154 orang dan Bantuan Calon Induk sebanyak 10 orang.

Penanggung Jawab Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang terlibat di bidang Ikan Air Laut (orang) berada di Tim Kerja Kelembagaan dan NSPK. Pengukuran penghitungan indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di bidang Ikan Air Laut (orang) dihitung berdasarkan tenaga Kerja yang terlibat langsung pada kegiatan bantuan pembenihan ikan air laut dan bantuan calon induk yang diperoleh dari 4 (empat) UPT Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu : (i) BPBL Batam, (ii) BBPBL Lampung, (iii) BPBL Lombok dan (iv) BPBL Ambon.

**Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Budi Daya Ikan Air Laut (orang) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Direktorat Ikan Air Laut								
Nama Indikator: Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Ikan Air Laut (orang)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020 – 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
0	0	0	-	-	-	164	-	-

Pengukuran Indikator Kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Ikan Air Laut (orang) Triwulan III Tahun 2024 dilakukan secara Tahunan, sehingga capaiannya baru diketahui pada akhir Tahun.

## SS.2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi

Sasaran Strategis Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

### IKU 2. Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)

Kluster tambak yang siap operasional meliputi pembangunan kluster tambak udang dan revitalisasi tambak bandeng dengan kriteria sebagai berikut:

- Kluster tambak udang siap operasional merupakan pembangunan petakan tambak udang yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana budidaya, seperti jaringan listrik, kincir, dan plastik pelapis tambak (lining).
- Sedangkan kluster tambak bandeng siap operasional merupakan revitalisasi kawasan tambak bandeng yang difasilitasi dengan sarana produksi berupa benih dan pakan ikan.

Target indikator kinerja Kluster tambak yang siap operasional, terdiri dari : (a) pembangunan kluster tambak udang, dengan target 2 kluster dan (b) revitalisasi kluster tambak bandeng, dengan target 7 kluster. Jumlah usaha budidaya tambak dengan konsep kawasan tambak udang dan bandeng sebanyak 9 kluster, terdiri dari : 2 kluster tambak udang dan 7 kluster tambak bandeng dikerjakan oleh UPT DJPB dengan rincian : **(a) BPBAP Situbondo:** 1 tambak udang di Kabupaten Pangandaran dan 1 tambak bandeng di Kabupaten Gresik; **(b) BBPBAP Jepara:** 1 tambak udang di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan 4 tambak bandeng di Kabupaten Tangerang/Mauk; **(c) BLUUPB Karawang:** 1 tambak bandeng di Kabupaten Karawang; **(d) BPBAP Takalar:** 1 tambak bandeng di Kabupaten Pangkep. Penghitungan capaian Indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah kluster tambak udang dan bandeng siap operasional merujuk pada definisi siap operasional yang pengukurannya dilakukan akhir tahun.

**Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kluster tambak yang siap operasional (Kluster)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	9	-	-

Berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Kluster tambak yang siap operasional (Kluster), maka beberapa upaya yang telah dilakukan selama Triwulan III meliputi :

**a. Penetapan Kelompok**

Menetapkan kelompok penerima bantuan kluster udang yang berlokasi di 5 (lima) Kabupaten, yang meliputi :

- Penetapan kelompok penerima bantuan kluster udang yaitu pokdakan anak langkat bertuah di Kabupaten Langkat,
- penetapan kelompok penerima bantuan kluster udang di Kabupaten Pangandaran yaitu kelompok vanamei Putra Pamotan,
- penetapan kelompok penerima berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan pada triwulan sebelumnya yaitu: Kelompok Makmur Bahari di Kabupaten Gresik, Kelompok Mina Payau Mandiri dan Sukses Bersama Mina Payau Mandiri di Kabupaten Karawang, serta Kelompok Sungguminasa di Kabupaten Pangkep.

**b. Pelaksanaan Pembangunan Kluster Udang**

Perkembangan pembangunan kluster udang berlokasi di 2 (dua) Kabupaten, yang meliputi :

- dimulainya pelaksanaan pembangunan kluster udang di Kabupaten Langkat dengan progress 86,81% dengan serapan anggaran Rp. 4.774.496.978,-
- telah dilaksanakan pembangunan kluster udang di Kabupaten Pangandaran dengan progress 80,52% dengan serapan anggaran Rp. 3.787.289.550,-
- Pada kluster pangandaran yaitu persiapan tebar, proses budidaya dan melakukan pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- Pada kluster Langkat yaitu pelaksanaan proses budidaya dan monitoring serta evaluasi.

**c. Pelaksanaan Pembangunan Kluster Bandeng**

Pembangunan kluster bandeng yang berlokasi di 3 (tiga) kabupaten, yang meliputi :

- Kabupaten Gresik, dengan progress pekerjaan 98,83% dengan serapan anggaran

- Rp. 675.490.600,-
- Kabupaten Tangerang, dengan progress pekerjaan 90,59% dengan serapan anggaran Rp. 2.512.669.407,- dengan upaya yang telah dilakukan berupa
  - Kabupaten Pangkep, dengan progress pekerjaan 99,81% dengan serapan anggaran Rp. 685.120.484,-
  - Kabupaten Karawang dengan progress pekerjaan 79,62% dengan serapan anggaran Rp. 557.373.256,-
  - Upaya yang telah dilaksanakan selama Triwulan III, yaitu : (i) klaster bandeng di Mauk : merapikan kontruksi di klaster bandeng Mauk; (ii) Klaster bandeng di Gresik: melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses budidaya yang sudah dilakukan, (iii) Klaster bandeng Pangkep : melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses budidaya yang dilakukan dan melakukan pencatatan kegiatan yang telah dilakukan pada proses budidaya; (iv) Klaster bandeng di karawang sedang dilakukan proses budidaya, selanjutnya perlu dilakukan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses budidaya.

Pada Triwulan III diharapkan semua proses budidaya baik pada klaster bandeng dan klaster udang dapat berjalan dengan baik, dan mendapat hasil panen yang seperti di harapkan.

### **IKU.3 Kawasan Budi Daya Udang yang Direncanakan Saluran Irigasinya (Kawasan)**

Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan dengan luas minimal 10 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 55 Tahun 2020). Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya merupakan lokasi yang direncanakan akan dilakukan perbaikan terhadap sistem pengelolaan air guna mendukung peningkatan perikanan budi daya. Perencanaan terhadap perbaikan sistem tata air tambak dalam pembangunan kawasan budi daya perikanan mengacu pada rencana *Detail Engineering Design* (DED) kawasan tambak.

Cara pengukuran Indikator kinerja tersebut dilakukan dengan menghitung banyaknya kawasan budi daya udang yang akan direncanakan saluran irigasinya. Indikator kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) merupakan indikator yang baru dimunculkan pada Tahun 2024 dan pengukurannya dilakukan secara Tahunan. Perolehan sumber data terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut berasal dari Tim kerja Prasarana dan Sarana Kawasan Budi Daya.

**Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kawasan Budi Daya Udang yang direncanakan saluran irigasinya (Kawasan)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020 -2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
0	0	0	0	0	-	1	0	0

Pada Triwulan III untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak Paket I telah dilakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Telah disusunnya dan ditetapkannya Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Ikan Air Laut nomor 52/DJPB.2/PB.220/I/2024 Tentang Tim Pembahas Penyusunan DED Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 3 Januari 2024 dan ditetapkan perubahannya sesuai Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Ikan Air Laut nomor 3652/DJPB.2/PB.220/IV/2024 Tentang Perubahan Tim Pembahas Penyusunan DED Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Mei 2024;
- b. Telah dilakukan penyusunan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS serta *Draft* Rancangan Kontrak. Dokumen Pengadaan ini telah disampaikan kepada Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa melalui Nota Dinas Nomor 38/DJPB.2/PB.220/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 untuk dapat dilanjutkan dengan metode lelang umum;
- c. Telah disusunnya dan ditetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Lokasi Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design Kawasan Tambak Tahun Anggaran 2024 tanggal 8 Januari 2024;
- d. Telah dilakukannya koordinasi terkait dengan lokasi prioritas pekerjaan pada tanggal 25 Januari 2024 antara Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dan Direktorat Ikan Air Laut;
- e. Menerima Nota Dinas dari UKPBJ KKP Nomor 321/PBJ.4.2/PL,460/II/2024 tanggal 27 Februari, dimana dijelaskan bahwa pemenang lelang adalah PT. Sapta Adhi Pratama dengan nilai klarifikasi dan negosiasi sebesar Rp. 1.116.819.840,00;
- f. Telah dilakukan Persiapan Penunjukkan Pemenang Barang/Jasa dan menerbitkan Surat Penunjukkan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pekerjaan Penyusunan DED Kawasan Tambak Paket I Nomor 2102/DJPB.2/PB.220/ SPPBJ/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;
- g. Dilanjutkan dengan ditandatanganinya Kontrak/Surat Perjanjian Nomor 2153/DJPB.2/K/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 2154/DJPB.2/SPMK/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;

- h. Telah dilakukan persiapan pelaksanaan kontrak pada tanggal 14 Maret 2024 di Kabupaten Indramayu;
- i. Penyedia telah menyerahkan Laporan Konsepsi Perancangan sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Termin I Nomor 01/BA-PAKET1/KKP-SAP/DED/IV/2024 Tanggal 17 April 2024;
- j. Telah dilakukan Pembayaran Termin I sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 3251/DJPB.2/PL.420/BAP-T1/IV/2024 Tanggal 17 April 2024 sebesar Rp. 111.681.984,-;
- k. Penyedia telah menyerahkan Laporan Pra Rancangan sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Termin II Nomor 05/BA-PAKET1/KKP-SAP/DED/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024;
- l. Telah dilakukan Pembayaran Termin II sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 4571/DJPB.2/PL.420/BAP-T2/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024 sebesar Rp. 223.363.968,-;
- m. Telah dilakukan pembahasan Laporan Pengembangan Rancangan pada tanggal 25-28 Juni 2024;
- n. Telah dilakukan pembayaran Termin III tanggal 19 Juli 2024;
- o. Telah dilakukan pembahasan laporan Rancangan Detail pada tanggal 13-16 Agustus 2024;
- p. Telah dilakukan pembayaran Termin IV termasuk serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK pada tanggal 30 Agustus 2024.

Tidak terdapat kendala pada Triwulan III ini, kemudian akan dilanjutkan dengan serah terima hasil DED kepada instansi terkait khususnya Kementerian PUPR pada triwulan IV. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III baru terserap 94,22% atau sebesar Rp. 1.413.387.240,- dari pagu Rp1.500.000.000.

#### **IKU.4 Kawasan Perikanan Budi Daya Yang Mendapat Kemudahan Pengairan/Irigasi (Kawasan)**

Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (kawasan) merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan dengan luas minimal 10 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2020). Kawasan Perikanan Budi Daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi tambak tertier merupakan kawasan yang memperoleh dampak dari kegiatan PITAP.

Capaian indikator kinerja tersebut berupa dampak saluran dari hasil pekerjaan PITAP dengan target 8 (delapan) kawasan. Penanggung jawab Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) berada di Tim Kerja Prasarana dan Sarana Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut.

**Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Meningkatnya kawasan perikanan budi daya yang direvitalisasi								
Nama Indikator: Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020 -2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
8	8	100	35	?120	-	8	8	100

Cara pengukuran Indikator kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi (Kawasan) dilakukan dengan menghitung jumlah Kawasan perikanan budi daya yang memperoleh dampak pengairan irigasi tambak tertier dari kegiatan PITAP. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja tersebut baru dapat diketahui pada Triwulan III sesuai dengan target yang telah direncanakan dan serah terima pekerjaan PITAP.

Pada Triwulan III, Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi sudah mencapai 100 % yaitu sebanyak 8 kawasan. Hal ini sejalan dengan selesainya kegiatan PITAP Tahun Anggaran 2024, yaitu di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Demak, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Subang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Maros. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka capaian Indikator kinerja tersebut mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan target Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket) juga mengalami penurunan pada Tahun 2024. Rincian capaian Indikator Kinerja Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7. Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi**

KABUPATEN	POKLINA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KAWASAN	REALISASI PANJANG SALURAN (m)	LUAS TERAIRI (ha)
Cirebon	Kali Jaka	Jati Merta	Gunung Jati	1	563.0	20
Demak	Sumber Rejeki	Banjarsari	Sayung	1	1,603.8	57
Lamongan	Sedulur Tani	Glagah	Glagah	1	1,200.0	64
Tangerang	Banyu Bina Bersama	Pagedangan Ilir	Kronjo	1	714.5	
Subang	Tani Jaya	Anggasari	Sukasari	1	1,320.0	128
		Anggasari	Sukasari		1,320.0	
Pekalongan	Kerto Mina Mandiri	Kemplong	Wiradesa	1	585.0	26

KABUPATEN	POKLINA	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KAWASAN	REALISASI PANJANG SALURAN (m)	LUAS TERAIRI (ha)
Banyuwangi	Wringin Putih Makmur	Wringin Putih	Muncar	1	1,569.0	84
		Wringin Putih	Muncar		1,325.0	
Maros	Julu Kana	Marannu	Lau	1	1,050.0	80
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>11,250.3</b>	<b>458</b>

Dampak dari kegiatan PITAP, pada 8 Kawasan perikanan budi daya yang mendapat kemudahan pengairan/irigasi telah terehabilitasi saluran tambak sepanjang 11.250,3 m' dan luas lahan tambak yang terairi sebesar 458 Ha.

### SS.3. Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan

Sasaran Strategis Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:

#### **IKU.5 Persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%)**

Indikator persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%) merupakan alat berat excavator yang telah dimanfaatkan masyarakat dalam mendukung kegiatan usaha budi daya perikanan agar meningkatkan produktifitas budi daya perikanan. Target indikator persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan (%) sebesar 75% yang diukur pada akhir tahun. Pada tahun 2024, nomenklatur Indikator tersebut merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja tahun 2023 yaitu Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan (%). Sebagai dampaknya, maka capaian pada Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2023.

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan persentase realisasi bantuan excavator yang telah dimanfaatkan masyarakat dibandingkan dengan realisasi excavator yang telah diterima kelompok penerima. Capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan laporan pemanfaatan excavator ke masyarakat dan Berita Acara Serah Terima Barang (Excavator). Jumlah bantuan sarana kawasan budi daya yang disalurkan ke masyarakat pada Tahun 2024 berjumlah 96 unit. Pencapaian indikator sarana kawasan budidaya yang disalurkan berupa excavator menjadi tanggung jawab Tim Kerja Kawasan Budi Daya Ikan Air Laut.

**Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatnya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan								
Nama Indikator: Persentase bantuan sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020 - 2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	75	-	-

Capaian Indikator kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) baru akan dilakukan pengukurannya pada akhir Tahun. Secara umum tahapan pendistribusian excavator ke masyarakat, dilakukan melalui tahapan : (1) identifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL); (2) verifikasi dan penetapan CPCL; (3) persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; (4) serah terima bantuan excavator; dan (5) penyusunan laporan pemanfaatan oleh kelompok penerima bantuan excavator.

Selama Triwulan III, upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%), antara lain : (i) dilakukannya verifikasi terhadap Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) ke kelompok masyarakat berdasarkan pengajuan proposal CPCL dan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Excavator Tahun 2024. Hingga tanggal 30 September 2024, Verifikasi CPCL yang sudah dilaksanakan berjumlah 70 CPCL dimana SK penetapan kelompok berjumlah 66 kelompok penerima dengan keterangan serah terima alat berat excavator telah selesai dilaksanakan ke 56 kelompok masyarakat dan proses pengiriman unit sedang berlangsung untuk 10 kelompok masyarakat, sedangkan 4 CPCL masih terdapat perbaikan dalam kelengkapan proposal, (ii) pengadaan barang dan jasa pengiriman alat berat melalui e-katalog dengan memperhatikan ketentuan terkait penggunaan produk dalam negeri nilai TKDN dan BMP dan kualifikasi usaha kecil serta koperasi (UMKK) dan (iii) serah terima alat berat excavator yang telah direalisasikan ke 56 kelompok penerima bantuan di 51 Kabupaten dan dilakukan commissioning oleh mekanik dari penyedia. Pada saat serah terima, dijelaskan juga mengenai pelaporan pemanfaatan alat berat excavator terhadap rencana yang sudah dituangkan dalam proposal yang diajukan.

**Tabel 9. Daftar Excavator yang telah Didistribusikan ke Masyarakat Hingga Triwulan III Tahun 2024**

No	Provinsi		Kabupaten/Kota	Nama	Keterangan
1	Aceh	1	Aceh Utara	Keuramat Jaya Kilometer Enam	Selesai BAST

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama	Keterangan	
		2	Aceh Tenggara	Pokdakan Tojung Maju	Selesai BAST
		3	Aceh Besar	Kelompok Maju Bersama	Selesai BAST
		4	Aceh Utara	Usaha Tani Tambak Awak Awai	Selesai BAST
2	Banten	5	Pandeglang	Yayasan Pendidikan Islam Baitussalmandedi Mandala Tirta	Selesai BAST
		6	Serang	Kelompok Tani Tambak Taman Kelapa	Selesai BAST
3	DIY	7	Sleman	Kelompok Budidaya Ikan Mino Ngremboko	Selesai BAST
4	Maluku Utara	8	Pulau Taliabu	Seho Kano	Selesai BAST
5	Jambi	9	Kota Jambi	Yayasan Rakyan Putra Jambi	Selesai BAST
6	Jawa Barat	10	Cianjur	Koperasi Syariah Al Mubarakah	Selesai BAST
	Jawa Barat	11	Indramayu	Koperasi Bahari Tiga Serangkai	Selesai BAST
	Jawa Barat	12	Subang	Pokdakan Wana Tambak Jaya	Selesai BAST
	Jawa Barat	13	Bogor	Pokdakan Rimba Jaya	Selesai BAST
	Jawa Barat	14	Garut	Yayasan Al-Amin Garut Selatan Indonesia	Selesai BAST
	Jawa Barat	15	Sukabumi	Yayasan Al-Fath	Selesai BAST
7	Jawa Tengah	16	Pati	Pokdakan Mina Lestari	Selesai BAST
	Jawa Tengah	17	Klaten	Mina Sejahtera	Selesai BAST
	Jawa Tengah	18	Kebumen	Pokdakan Waja Makmur	Selesai BAST
	Jawa Tengah	19	Blora	Pokdakan Tunas Jaya Duku Padang	Selesai BAST
	Jawa Tengah	20	Magelang	Pokdakan Wono Minasari	Selesai BAST
8	Jawa Timur	21	Nganjuk	Pokdakan Al-Khoiriyah	Selesai BAST
	Jawa Timur	22	Ponorogo	Yayasan Ponpes Al-Bukhori Mangunan	Selesai BAST
	Jawa Timur	23	Blitar	Pokdakan Saman Lestari	Selesai BAST
	Jawa Timur	24	Sidoarjo	Koperasi Agar Makmur Sentosa	Selesai BAST
9	Kalimantan Barat	25	Sambas	Pokdakan Kompak	Selesai BAST
	Kalimantan Barat	26	Sintang	Pokdakan Mandiri Juwao agro	Selesai BAST
10	Kalimantan Tengah	27	Kotawaringin Barat	Barokah Jaya	Selesai BAST
11	Kalimantan Timur	28	Kutai Kartanegara	Pokdakan Mitra Belayan	Selesai BAST
12	Lampung	29	Tulang Bawang	Pokdakan Windu Sejahtera	Selesai BAST

No	Provinsi		Kabupaten/Kota	Nama	Keterangan
	Lampung	30	Lampung Utara	Pokdakan Blambangan Harapan Jaya Abadi	Selesai BAST
	Lampung	31	Tulang Bawang	Pokdakan Way Dente Mina Sejahtera	Selesai BAST
13	Maluku	32	Buru	Pokdakan Bina Bupolo Sejahtera	Selesai BAST
15	Sulawesi Utara	33	Manado	Universitas Sam Ratulangi	Selesai BAST
16	NTB	34	Sumbawa	Pokdakan Nanga Desa	Selesai BAST
		35	Bima	Pokdakan Sangia Maju	Selesai BAST
		36	Bima	Koperasi Pemasaran Ar-Rahman Jaya Mandiri	Selesai BAST
		37	Bima	Koperasi Pemasaran Putra Bahari Express	Selesai BAST
		38	Manggarai Barat	Koperasi Nelayan Rumah Biru Sejahtera	Selesai BAST
17	NTT	39	Kupang	Pokdakan Sejahtera	Selesai BAST
18	Papua Selatan	40	Merauke	Semangat Tani 2	Selesai BAST
19	Riau	41	Pelalawan	Taruna Jaya	Selesai BAST
20	Sulawesi Barat	42	Mamuju Tengah	Pokdakan Benur Super	Selesai BAST
	Sulawesi Barat	43	Mamuju	Eksport II	Selesai BAST
21	Sulawesi Selatan	44	Bone	Pokdakan Tunas Muda	Selesai BAST
		45	Sidenreng Rappang	Maddeppa Teppaja	Selesai BAST
		46	Luwu	Yayasan Ruhama Pondok Pesantren Hidayatullah	Selesai BAST
		47	Jeneponto	Pokdakan Berkah	Selesai BAST
		48	Pangkajene Kepulauan	Koperasi Bandeng Sejahtera Manakku	Selesai BAST
		49	Luwu	Pokdakan Tarusan	Selesai BAST
22	Sulawesi Utara	50	Minahasa Selatan	Pokdakan Mapallus	Selesai BAST
23	Sumatera Selatan	51	Musi Rawas	Pokdakan Mina Rezeki Wonokerto	Selesai BAST
	Sumatera Selatan	52	Penukal Abab Lemata Ilir	Pokdakan Harapan Maju	Selesai BAST
	Sumatera Selatan	53	Banyuasin	Gapokkan Lima Cahaya Sakti	Selesai BAST
24	Sumatra Barat	54	Pesisir Selatan	Koperasi Produsen Gerakan Ekonomi 20	Selesai BAST
25	Sumatra Utara	55	Samosir	Ringgas Mangula	Selesai BAST
	Sumatra Utara	56	Nias Utara	Pokdakan Sanuwu	Selesai BAST

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) diantaranya : keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi penerima dan kendala terkait pendaftaran kusuka perorangan/korporasi oleh penyuluh. Rencana aksi yang akan dilakukan dalam triwulan selanjutnya yaitu koordinasi antara kelompok, dinas perikanan, dan penyuluh lebih intens terutama di lokasi yang jaringan internetnya terbatas, serta membantu penyampaian terkait kendala kusuka oleh admin kusuka yang ada di Pusat. Upaya yang akan dilakukan dalam memenuhi realisasi pada triwulan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan kelompok, dinas, beserta penyuluh perikanan guna kelengkapan proposal yang diajukan untuk bantuan excavator. Penjelasan terkait juknis bantuan excavator tahun 2024 saat pelaksanaan verifikasi dan pelaporan pemanfaatan alat berat excavator saat BAST di kelompok penerima bantuan pemerintah.

Serapan pagu anggaran dalam upaya mencapai indikator kinerja Persentase Sarana Kawasan Budi Daya yang Dimanfaatkan Masyarakat (%) hingga Triwulan III sudah mencapai 94.65% yakni 121,938,467,094 dari pagu anggaran 128,833,000,000 yang dialokasikan.

#### IKU.6 Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (Paket)

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi tambak tersier berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan. Target indikator persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi sebesar 10 paket.

Cara penghitungan capaian indikator tersebut berdasarkan banyaknya saluran irigasi tambak tersier yang direhabilitasi dengan perolehan sumber data yang berasal dari Tim Kerja Prasarana dan Sarana Kawasan Budi Daya. Indikator Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (Paket) merupakan penyesuaian dari indikator yang ditetapkan Tahun 2023 yaitu : Persentase Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (%).

**Tabel 10. Capaian Indikator Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (paket) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatkan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan								
Nama Indikator: Saluran irigasi tambak yang direhabilitasi (Paket)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
10	10	100	55	18,18	-	10	100	0

Pada Tahun 2023, Indikator kinerja yang ditetapkan terkait pekerjaan PITAP yaitu : Persentase saluran irigasi tambak yang direhabilitasi berdasarkan usulan masyarakat (%), dengan target 80%. Akan tetapi, terkait dengan target kegiatan PITAP pada Tahun tersebut ditetapkan sebanyak 55 paket dengan realisasi 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Triwulan yang sama pada tahun 2024 maka capaian kegiatan PITAP terealisasi sebesar 18,18%, disebabkan adanya penurunan target IKU saluran irigasi tambak yang direhabilitasi.

Pada akhir triwulan III, pada indikator Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (paket) sampai pada bulan September 2024 ini, telah mencapai 100 % dengan penyaluran sebanyak 10 Paket di 8 Kabupaten. Pada triwulan ini telah dibuat BAST sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah PITAP yang diterima oleh POKLINA, yaitu Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan dari POKLINA ke PPK dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari PPK kepada KPA. Rencana tindak lanjut yaitu proses penandatanganan BAST KPB ke Poklina.

**Tabel 11. Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) TA. 2024**

PROVINSI	KABUPATEN	POKLINA	KETUA POKLINA	PAKET	Anggaran	Progres Pekerjaan Fisik (%)
Jawa Barat	Cirebon	Kali Jaka	E. Rochadi	1	170,000,000	100
Jawa Tengah	Demak	Sumber Rejeki	Sudarno	1	170,000,000	100
Jawa Timur	Lamongan	Sedulur Tani	Abdul Qohar	1	170,000,000	100
Banten	Tangerang	Banyu Bina Bersama	Ahmad Sopiyan Bahadi	1	170,000,000	100
Jawa Barat	Subang	Tani Jaya	Juheri Heryana	2	340,000,000	100
Jawa Tengah	Pekalongan	Kerto Mina Mandiri	Wahrodji	1	170,000,000	100
Jawa Timur	Banyuwangi	Wringin Putih Makmur	Syahrul Ahmad Yusuf	2	340,000,000	100
Sulawesi Selatan	Maros	Julu Kana	Safaruddin	1	170,000,000	100
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>1,700,000,000</b>	

**Tabel 12. Rekap BAST Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) TA. 2024**

No.	Nama Poklina	BAST Poklina-PPK	BAST PPK-KPA	BAST KPB-Poklina
1	Kali Jaka	017/BAST/PKJK/V/2024	4271/DJPB.2/BAST/V/2024	4411.1/DJPB.2/BAST/V/2024
2	Sumber Rejeki	02/PKLN.SR/V/2024	4271/DJPB.2/BAST/V/2024	4411.2/DJPB.2/BAST/V/2024
3	Sedulur Tani	94/POKLINA-ST/V/2024	4271/DJPB.2/BAST/V/2024	4411.3/DJPB.2/BAST/V/2024

No.	Nama Poklina	BAST Poklina-PPK	BAST PPK-KPA	BAST KPB-Poklina
4	Banyu Bina Bersama	b3/36-pitap/V/2024	4681/DJPB.2/BAST/VI/2024	4964.1/DJPB.2/BAST/VI/2024
5	Tani Jaya	017/TNJ/V/2024	4681/DJPB.2/BAST/VI/2024	4964.2/DJPB.2/BAST/VI/2024
6	Kerto Mina Mandiri	41/KKM/V/2024	4681/DJPB.2/BAST/VI/2024	4964.3/DJPB.2/BAST/VI/2024
7	Wringin Putih Makmur	018/WM/V/2024	4681/DJPB.2/BAST/VI/2024	4964.4/DJPB.2/BAST/VI/2024
8	Julu Kana	16/POKLINA JK/LAU/V/2024	4681/DJPB.2/BAST/VI/2024	4964.5/DJPB.2/BAST/VI/2024

Hingga akhir triwulan III, anggaran yang telah terserap dalam mencapai IKU Persentase Saluran Irigasi Tambak yang Direhabilitasi (%) yaitu Rp. 2.157.191.223 dari pagu Rp. 2.367.000.000 atau 91,14 %. Sisa anggaran yang ada, akan dialokasikan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak kegiatan PITAP 2024 sejumlah Rp 209.808.777.

#### SS.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan

Sasaran meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu:

##### IKU 7. Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%)

Indikator kinerja Persentase NSPK di Kesehatan Ikan merupakan dokumen NSPK yang disusun oleh Tim Kerja NSPK dan Kelembagaan yang meliputi Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia dan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan. NSPK di bidang kesehatan ikan yang dimaksud yaitu NSPK di bidang residu dan bidang penyakit ikan dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar 75%. Pengukuran Indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kumulatif dengan target kumulatif dalam renstra dalam kurun waktu 2020-2024.

Indikator kinerja ini merupakan indikator yang baru ditetapkan pada triwulan III Tahun 2023. Target dokumen NSPK yang akan dihasilkan pada Tahun 2024 sebanyak 7 dokumen bidang kesehatan ikan berupa Peraturan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan dokumen RSNI bidang kesehatan ikan. Pengukuran capaian Indikator kinerja Persentase NSPK di Kesehatan Ikan yang disusun (%) dilakukan secara triwulanan. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 13. Rincian Target Jumlah Dokumen NSPK Bidang Kesehatan Ikan Tahun 2024**

No	NSPK	Target (dokumen)	Produk NSPK
1	Bidang Residu	6	Revisi Peraturan Menteri (1 dokumen), Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (2 dokumen), dan RSNI3 (3 dokumen)

No	NSPK	Target (dokumen)	Produk NSPK
2	Bidang Hama dan Penyakit Ikan	1	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (1 dokumen)
	<b>Total</b>	<b>7</b>	

**Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang Disusun (%)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024 (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
43	100	>120	0	0	-	75	>120	-

Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Triwulan III Tahun 2024 terealisasi sebesar >120% yang diperoleh berdasarkan realisasi NSPK sebesar 100% dibandingkan dengan target triwulanan. Selanjutnya, secara realisasi jumlah NSPK yang telah disusun di bidang kesehatan ikan berjumlah 3 dokumen, yaitu :

- 1) Keputusan Dirjen PB No 59 Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Residu Nasional tahun 2024;
- 2) Keputusan Dirjen PB No. 60 Tahun 2024 tentang Laboratorium Acuan dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024;
- 3) Keputusan Dirjen PB No 89 Tahun 2024 tentang Rencana Surveilans Resistensi Antimikroba Tahun 2024;
- 4) RSNI3 : Nekropsi ikan bersirip untuk tujuan diagnosis penyakit.
- 5) RSNI 3 : Metode pengambilan contoh uji untuk pemeriksaan penyakit pada ikan dan krustasea yang bernilai tinggi tanpa mematikan (*non-lethal*).
- 6) RSNI 3 : Uji kesehatan benur penaeid siap tebar;
- 7) Perubahan PerMen KP No 37/PERMENKP/2019 tentang Pengendalian Residu pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi

**Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%) Triwulan III Tahun 2024**

NO	NSPK	Target Tahunan	Produk NSPK	Target Triwulan III (Dokumen)	Target Triwulan III (%)	Realisasi Triwulan III (Dokumen)	Capaian Triwulan III (%)
1	Bidang Residu	6	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, RSNI dan	2	43	6	<b>100</b>

NO	NSPK	Target Tahunan	Produk NSPK	Target Triwulan III (Dokumen)	Target Triwulan III (%)	Realisasi Triwulan III (Dokumen)	Capaian Triwulan III (%)
			Perubahan PerMen KP 37/PERMEN-KP/2019				
2	Bidang Hama dan Penyakit Ikan	1	Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya	1		1	
	<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>		<b>2</b>		<b>7</b>	

Dalam upaya mendorong tercapainya Indikator kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%), telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya : (i) Harmonisasi Peraturan perundangan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Residu Pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024,(ii) Rapat Teknis RSNI 3 bidang Kesehatan Ikan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2024. Kegiatan Rapat teknis 3 merupakan tahap akhir perumusan RSNI 3 di tingkat Kementerian Teknis yang selanjutnya akan diproses lebih lanjut di BSN menjadi SNI. RSNI yang dibahas pada rapat teknis RSNI 3 yang akan dihitung menjadi capaian Indikator Kinerja Presentase NSPK Bidang Kesehatan Ikan yang disusun (%). Pada tahun 2024, Direktorat Ikan Air Laut mengajukan 3 judul RSNI melalui Sekretariat Komtek 65-07, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 16.** Judul dan Konseptor Rapat Teknis RSNI 3 bidang Kesehatan Ikan 2024

No.	Judul	Konseptor	Instansi	Keterangan
1.	Nekropsi ikan bersirip untuk tujuan diagnosis penyakit	Wiwin Wiyani & Ratna Amalia Kurniasih	BPKIL Serang	Revisi SNI 7907:2013
2.	Metode pemeriksaan penyakit pada ikan bernilai tinggi tanpa mematikan ( <i>non-lethal</i> )	Wiwin Wiyani & Ratna Amalia Kurniasih	BPKIL Serang	Revisi SNI 7955:2014
3.	Uji kesehatan benur penaeid siap tebar secara laboratoris	Sri Murti Astuti	BBPBAP Jepara	Revisi SNI 7957:2014

Anggaran kegiatan perumusan RSNI bidang Kesehatan Ikan telah terealisasi Rp 210,723,000 dari Pagu Rp 244,093,000 atau sebesar 86,33%.

#### **IKU 8. Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%)**

Tingkat kualitas implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian residu nasional yang bertujuan untuk mengukur kualitas terhadap kinerja implementasi terhadap NRMP. Pelaksana kegiatan NRMP

berada di 26 Provinsi dengan obyek monitoring residu berupa komoditas bandeng, lele, nila, patin, dan udang dengan target sampel monitoring residu secara nasional berjumlah 4.000 sampel. Penanggung jawab indikator kinerja Tingkat Kualitas Implementasi NRMP berada di Tim kerja NSPK dan Kelembagaan.

Pelaksana kegiatan monitoring residu melalui kegiatan pengambilan sampel hingga pengujian sampel di 26 Provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Capaian diukur berdasarkan data yang disajikan di dalam Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu (SIMPR) dengan mengukur aspek kesesuaian, kepatuhan dan ketercapaian. Pengukuran dilakukan pada akhir tahun dengan melakukan penilaian terhadap 3 aspek, sebagai berikut:

1. **Aspek Kesesuaian (bobot 30%)**, yaitu evaluasi kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi:
  - Kesesuaian Target Sampel masing-masing Provinsi (Implementasi – dokumen NRMP)
  - Kesesuaian Target Lokasi monitoring residu pada unit pembesaran dan pembenihan (Implementasi – dokumen NRMP).
2. **Aspek Kepatuhan (bobot 30%)**, yaitu evaluasi terhadap SOP terhadap (a) penginputan data monitoring residu pada aplikasi SIMPR, (b) Kriteria pengambilan sampel dan (c) pemenuhan mekanisme jika ditemukan ketidaksesuaian hasil pengujian (*Non Compliance*);
3. **Aspek ketercapaian (bobot 40%)**, diukur berdasarkan capaian terhadap target sampel di masing-masing Provinsi.

**Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi National Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Tingkat Kualitas Implementasi <i>National Residue Monitoring Plan</i> (NRMP)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2024	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020 - 2024	Target 2024	Realisasi terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Target Renstra 2020 – 2024 (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	94	-	-

Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan* (NRMP) (%) merupakan indikator baru ditetapkan pada triwulan III Tahun

2023 yang merevisi Indikator sebelumnya yaitu Indikator kinerja Persentase sampel ikan yang dimonitor kandungan residunya (%). Capaian indikator Kinerja Persentase Tingkat Kualitas Implementasi National Residue Monitoring Plan (NRMP) (%) pada Bulan Maret belum dapat diketahui disebabkan pengukurannya baru diketahui pada akhir tahun.

Indikator kinerja monitoring residu yang dituangkan di dalam Renstra 2020-2024 pada tahun 2024 berjumlah 26.000 sampel, namun target sampel tersebut mengalami penurunan menyesuaikan ketersediaan anggaran Tugas Peantuan di 26 Provinsi. Pada tahun 2024, secara jumlah sampel yang ditargetkan sebanyak 4.000 sampel namun pengambilan sampel baru dilakukan pada Triwulan III. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian dalam pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring Residu yang sebelumnya melalui Dana Dekonsentrasi kemudian menjadi Tugas Peantuan. Hal tersebut membutuhkan tahapan yang harus dilakukan Satker Tugas Peantuan di Dinas Provinsi agar anggaran dapat dimanfaatkan, antara lain : Penetapan PPK, mengangkat bendahara, hingga mengajukan pembukaan rekening Virtual Account ke KPPN yang selanjutnya dilaporkan pada aplikasi SPRINT. Upaya yang telah dilakukan untuk mendorong capaian sampel monitoring residu yaitu dengan memantau dan mengkordinasikan secara intensif upaya yang harus dilakukan Satker Dinas KP di 26 Provinsi dalam kaitannya dengan tahapan pelaksanaan pengelolaan anggaran Tugas Peantuan.

**Tabel 18. Rincian target dan realisasi sampel monitoring residu di 26 Provinsi pada Triwulan III Tahun 2024**

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Aceh	Udang	133	85	64
2	Sumatera Utara	Udang	118	76	64
		Nila	47	33	70
3	Sumatera Barat	Udang	20	20	100
		Nila	38	27	71
4	Riau	Udang	22	16	73
		Patin	55	37	67
5	Jambi	Patin	55	36	65
6	Bangka Belitung	Udang	59	35	59
7	Sumatera Selatan	Udang	109	66	61
		Patin	51	30	59
8	Bengkulu	Udang	42	28	67
9	Lampung	Udang	385	214	56
10	Banten	Udang	46	29	63
11	Jawa Barat	Udang	311	170	55
		Lele	94	63	67
		Nila	67	45	67
12	Jawa Tengah	Udang	125	80	64

No	Provinsi	Komoditas	Target	Realisasi	Persentase (%)
		Nila	73	46	63
13	DI Yogyakarta	Udang	42	30	71
14	Jawa Timur	Udang	264	213	81
		Bandeng	72	56	78
		Nila	73	57	78
		Lele	73	57	78
15	Bali	Udang	57	32	56
16	Nusa Tenggara Barat	Udang	423	235	56
17	Kalimantan Barat	Udang	60	32	53
18	Kalimantan Selatan	Udang	74	0	0
19	Kalimantan Tengah	Udang	8	8	100
		Patin	34	23	68
20	Kalimantan Timur	Udang	95	54	57
21	Kalimantan Utara	Udang	76	48	63
22	Sulawesi Tenggara	Udang	322	0	0
23	Sulawesi Tengah	Udang	114	65	57
24	Sulawesi Selatan	Udang	112	65	58
		Bandeng	67	39	58
25	Sulawesi Barat	Udang	99	56	57
26	Gorontalo	Udang	85	46	54
			<b>4000</b>	<b>2252</b>	<b>56</b>

Dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Implementasi *National Residue Monitoring Plan (NRMP)* (%) telah dilakukan beberapa rencana aksi, seperti : (i) Penyusunan *annual report 2023* dan *National residue monitoring plan (NRMP) 2024* yang telah disubmit ke Uni Eropa pada tanggal 31 Maret 2023; (ii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Tim Pengendalian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor: 59 Tahun 2024 tentang Tim Pengendalian Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024 (iii) Penyusunan Draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya terkait Laboratorium Acuan dan Pengujian Residu yang telah diterbitkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor: 60 Tahun 2024 Tentang Laboratorium Acuan Dan Laboratorium Pengujian Dalam Pelaksanaan Monitoring Residu Nasional Tahun 2024, pada tanggal 5 Februari 2024.

Berkaitan dengan pengambilan sampel triwulan III, diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara belum melaksanakan monitoring residu dikarenakan terkendala rekening Tugas Peantuan yang baru diterima menjelang akhir Triwulan III. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka verifikasi implementasi pengendalian residu (Pusat) tahun 2024 telah

terrealisasi sebesar 64,86 % atau Rp 57.179.900 dari pagu anggaran sebesar Rp 88.156.000.

#### IKU 9. Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala)

Indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan didefinisikan tingkat serangan penyakit ikan pada wilayah tertentu yang ditunjukkan dengan warna hijau, kuning dan merah pada peta sebaran penyakit ikan. Tingkat serangan penyakit ikan yang dimaksud merupakan hasil kegiatan monitoring penyakit ikan yang dilakukan di 34 Provinsi yang dilaporkan oleh operator Software Sistem Monitoring Penyakit Ikan (SSMPI) Dinas Perikanan Provinsi melalui SSMPI online. Jumlah sampel penyakit ikan yang dimonitor untuk mengetahui tingkat serangan penyakit ikan sebanyak 755 sampel.

Jenis penyakit ikan yang dimonitoring sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan. Penghitungan indikator kinerja Indeks serangan penyakit ikan bersifat maximize yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi semakin baik.

**Tabel 19. Skala Penentuan Indeks Pengendalian Penyakit Ikan (Skala)**

No	Tingkat Serangan Penyakit Ikan	Kategori Tingkat Serangan penyakit ikan	Warna pada peta sebaran penyakit ikan	Skala
1	Berat	≥ 60 %	Merah	1
2	Sedang	30 – 60 %	Kuning	2
3	Ringan	≤ 30 %	Hijau	3

**Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Indeks Serangan Penyakit ikan (Skala) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatnya kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Indeks serangan penyakit ikan (Skala)								
TW II 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	2	-	-

Monitoring penyakit ikan melalui anggaran Tugas Pembantuan (TP) pada tahun 2024 dialokasikan kepada 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Capaian Indikator Kinerja Indeks serangan penyakit ikan (Skala) Tahun 2024 diperoleh dari hasil pelaksanaan monitoring penyakit ikan yang pengukurannya dilakukan secara tahunan.

Monitoring penyakit ikan dilakukan melalui anggaran TP di 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan direncanakan dilakukan terhadap 17 penyakit ikan yaitu *Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)*, *Hepatopancreatic microsporidiosis caused by*

*Enterocytozoon hepatopenaei (HPM-EHP), Viral encephalopathy and retinopathy (VER/VNN), Enteric septicemia of catfish (ESC), Motile Aeromonas septicemia (MAS), Infection with tilapia lake virus (TiLV), Infection with Megalocytivirus, Red sea bream iridoviral disease (RSID), Infection with infectious myonecrosis (IMNV), Infection with white spot syndrome virus (WSSV), Streptococcosis (Streptococcus agalactiae), Streptococcosis (Streptococcus iniae), Infection with koi herpesvirus (KHV), Red sea bream iridoviral disease, Fish mycobacteriosis (Mycobacterium fortuitum), Vibriosis dan Ichthyophthiriasis (Ichthyophthirius multifiliis).*

Pelaksanaan surveilan/monitoring penyakit ikan dilakukan di 34 provinsi dengan target sampel yang diambil dan diuji sebanyak 755 sampel. Realisasi sampel pada triwulan III berjumlah 485 sampel atau sekitar 64,24% dari target tahunan. Pada triwulan III, pengambilan sampel baru dilakukan oleh 28 Provinsi, sedangkan 6 Provinsi lainnya yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua belum melakukan pengambilan sampel monitoring penyakit ikan. Secara detail jumlah sampel untuk setiap provinsi yang direncanakan dan yang telah terealisasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 21.

**Tabel 21. Rincian Target dan Realisasi Sampel Monitoring Penyakit Ikan di 34 Provinsi pada Triwulan III Tahun 2024**

No	Provinsi	Target Sampel	Realisasi Triwulan III	Persentase (%)
1	Aceh	27	18	66,67
2	Sumatera Utara	23	0	0
3	Sumatera Barat	26	12	46,15
4	Riau	26	19	73,08
5	Bengkulu	23	14	60,87
6	Kepulauan Riau	30	29	96,67
7	Jambi	34	33	97,06
8	Sumatera Selatan	23	22	95,65
9	Kepulauan Bangka Belitung	23	0	0
10	Lampung	30	31	103,33
11	Banten	8	4	50
12	DKI Jakarta	26	26	100
13	Jawa Barat	56	32	57,14
14	Jawa Tengah	53	33	62,26
15	DI Yogyakarta	30	18	60
16	Jawa Timur	30	21	70
17	Bali	15	5	33,33
18	Nusa Tenggara Barat	30	25	83,33

No	Provinsi	Target Sampel	Realisasi Triwulan III	Persentase (%)
19	Nusa Tenggara Timur	8	8	100
20	Kalimantan Barat	19	6	68,42
21	Kalimantan Tengah	8	6	75
22	Kalimantan Timur	19	0	0
23	Kalimantan Utara	19	11	57,89
24	Kalimantan Selatan	23	0	0
25	Sulawesi Utara	8	7	87,5
26	Sulawesi Selatan	26	30	115,38
27	Sulawesi Tengah	15	4	26,67
28	Gorontalo	23	11	52,17
29	Sulawesi Tenggara	15	0	0
30	Sulawesi Barat	15	15	0
31	Maluku Utara	11	11	100
32	Maluku	11	15	136,36
33	Provinsi Papua	11	0	0
34	Papua Barat	11	11	100
<b>Total</b>		<b>755</b>	<b>485</b>	<b>64,24</b>

Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator kinerja Indeks Serangan Penyakit Ikan (skala) pada triwulan III adalah terdapat Dinas KP yang masih terkendala dengan pemindahan akun Dekonsentrasi ke akun TP dan keterbatasan bahan uji di laboratorium karantina ikan. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi dengan bagian program DJPB dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait dengan monitoring penyakit ikan melalui anggaran tugas pembantuan. Anggaran yang dialokasikan dalam rangka melakukan pendampingan pengendalian penyakit ikan tahun 2024 sebesar Rp218.312.000 dengan serapan sebesar Rp 149.423.316,- atau 68,44%.

#### **IKU 10. Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%)**

Indikator kinerja mengenai *Antimicrobial Resistance* (AMR) merupakan pelaksanaan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia yang telah ditetapkan sejak tahun 2022. Resistansi antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Pengendalian Resistansi Antimikroba (*Antimicrobial Resistance/AMR*) merupakan aktivitas

yang ditujukan untuk mencegah dan/atau menurunkan adanya kejadian mikroba resistan. Tingkat resistansi mikroba diperoleh melalui pengujian resistensi antimikroba terhadap isolat bakteri patogen pada sampel ikan yang dilakukan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Penghitungan terhadap Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) dilakukan dengan membandingkan jumlah isolat bakteri target yang dinyatakan resisten terhadap antimikroba target dengan jumlah sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Bakteri yang menjadi target adalah bakteri yang sering menyerang ikan yaitu bakteri *Aeromonas hydrophila*, *Vibrio alginolyticus* dan *Vibrio parahaemolyticus*. Selain itu juga terdapat bakteri lingkungan yang menjadi target yaitu *Escherichia coli*. Antimikroba yang digunakan sebagai target surveilan AMR adalah: Oxytetracyclin, Tetracyclin dan Enrofloksasin.

Pengujian resistensi antimikroba dilaksanakan di 15 UPT- DJPB dengan target indikator kinerja sebesar 35%. Penghitungan indikator kinerja Indikator Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) diukur pada akhir tahun dan bersifat minimize yang menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat resistansi antimikrobanya maka semakin bagus pengendalian resistansi antimikrobanya. Jumlah sampel ikan yang diuji untuk mengetahui hasil uji yang resisten terhadap antimikroba sebanyak 735 sampel. Realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba sampai dengan triwulan III berjumlah 1209 sampel atau sekitar 164,49% dari target tahunan.

**Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan								
Nama Indikator : Persentase Bakteri patogen pada ikan yang resisten terhadap antimikroba (%)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW I 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020 – 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-	-	35	-	-

**Tabel 23. Rincian target dan realisasi sampel surveilan resistensi antimikroba Triwulan III Tahun 2024 di 15 UPT-DJPB**

No	UPT	Target sampel	Realisasi Triwulan III	Prosentase Realisasi (%)
1	Balai Budidaya Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung	59	72	122,034
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Perikanan Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi	70	82	117,14
3	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara	70	121	172,86

No	UPT	Target sampel	Realisasi Triwulan III	Prosentase Realisasi (%)
4	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam	34	42	123,53
5	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok	35	28	80
6	Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon	35	48	137,14
7	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam	35	84	240
8	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin	35	40	114,29
9	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	21	17	80,95
10	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo	56	70	125
11	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	35	25	71,43
12	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar	35	59	168,57
13	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang	56	58	103,57
14	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan (BPIU2K) Karangasem	35	36	102,86
15	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang	124	427	344,35
<b>Total</b>		<b>735</b>	<b>1209</b>	<b>164,49</b>

Permasalahan yang ada pada pencapaian Indikator kinerja Persentase Bakteri Patogen pada Ikan yang Resistan Terhadap Antimikroba (%) pada triwulan III yaitu (1) sulitnya mengisolasi bakteri target, (2) masih terdapat UPT yang belum selesai melakukan uji identifikasi bakteri target, (3) hasil uji sensitivitas antimikroba belum dilakukan untuk semua sampel yang teridentifikasi positif bakteri target. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut dilakukan koordinasi dengan UPT DJPB agar menyampaikan data hasil uji identifikasi bakteri dan sensitivitas secara berkala.

Anggaran yang dialokasikan dalam rangka NSPK bidang AMR tahun 2024 sebesar Rp 250.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.184.800,- hingga akhir Triwulan III sebesar 4,47%.

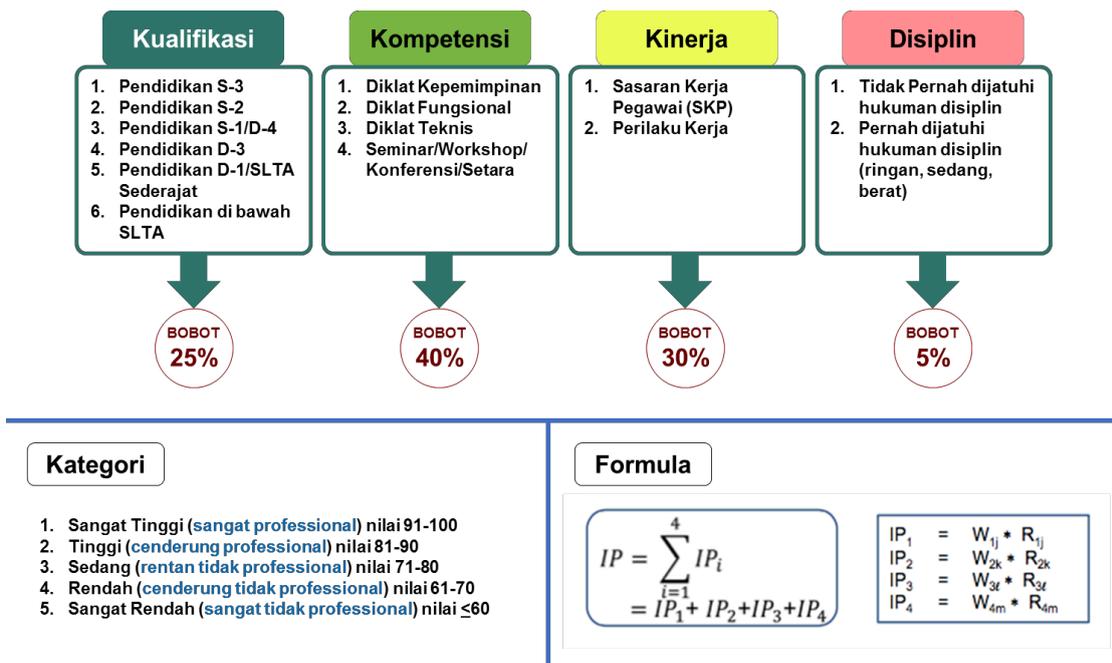
## SS.5. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut

Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup DJPB yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu:

### IKM.11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)

Indikator kinerja IKU ini adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis);
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



**Gambar 8. Formulasi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/*workshop*/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik. Pengukuran capaian IP ASN dilakukan pada semester 1 dan semester 2 pada tahun berjalan sehingga realisasi berikutnya pada akhir semester.

**Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut								
Nama Indikator Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2024	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW II 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020 – 2024
Target	Realisasi	Capaian (%)						
-	-	-	-	-		85	-	-

Pada Renstra DJPB 2020-2024, telah dicantumkan target IKU Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) sebesar 76, namun target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja menjadi lebih besar yaitu 80. Hasil penilaian IP ASN di Direktorat Ikan Air Laut. Pada Triwulan III, tidak dilakukan penilaian Indikator Kinerja tersebut dikarenakan pengukuran

Indikator akan dilakukan pada Semester II.

Perolehan nilai IP ASN dilakukan berdasarkan penghitungan 4 (empat) komponen IP ASN Adapun data capaian dapat dilihat pada *dashboard* di link <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ipasn/2024/unker/515>, meliputi : a) Kualifikasi dengan nilai 21,77; b) Kompetensi dengan nilai 29,41; c) Kinerja dengan nilai 27,31 dan d) Disiplin dengan nilai 5. Berikut merupakan perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks profesionalitas ASN di masing-masing unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

#### IKM. 12. Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)

Indikator kinerja PM SAKIP merupakan penyesuaian dari Indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi SAKIP yang telah tercantum pada Perjanjian Direktorat Ikan Air Laut sebelumnya. Perolehan PM SAKIP berdasarkan penilaian LKE pada aplikasi [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id).

Pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

**Tabel 25. Capaian Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut								
Nama Indikator : Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2023	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	34	82	-	-

Pada Triwulan III, indikator Nilai PM SAKIP Direktorat Ikan Air Laut (Nilai) belum tercapai dikarenakan pengukuran indikator dilakukan secara tahunan atau pada Triwulan IV.. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target Indikator Kinerja PM SAKIP melalui ketaatan dalam pemenuhan dokumen SAKIP baik terkait dengan dokumen perencanaan maupun pengukuran kinerja. Pada triwulan II, telah dilakukan enginputan data capaian Indikator Kienrja Direktorat Ikan Air Laut melalui aplikasi e kinerjaku serta penyusunan dokumen pengukuran kinerja, antara lain : Evaluasi Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Dokumen tersebut nantinya diupload di aplikasi ESR MenPan maupun ekinerjaku sebagai bukti ketaatan terhadap pemenuhan dokumen SAKIP.

**IKM. 13. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%)**

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2021 s.d. Triwulan IV Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang menjadi objek pengawasan.

$$Pengukuran\ Indikator\ Kinerja = \frac{Jumlah\ Rekomendasi\ yang\ Telah\ ditindaklanjuti\ Tuntas}{Jumlah\ Rekomendasi\ yang\ Diberikan} \times 100\%$$

Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon 1.

**Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut								
Nama Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi Triwulan III 2024 thd Triwulan III 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
80	88,57	110,71	100	90,33	80	80	110,71	110,71

Pada renstra DJPB 2020-2024 terdapat penetapan target IKU Indikator Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Ikan Air Laut yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) pada tahun 2024 sebesar 80. Capaian IKU Triwulan III diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 Juni 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan II Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 September 2024 (Triwulan III Tahun 2024).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar 90,18% (tuntas 597 dari 662 rekomendasi). Rincian capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%) masing-masing Satker disampaikan pada tabel 26 berikut ini.

**Tabel 27. Rekapitulasi Perbandingan Capaian IKU “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%) Eselon II Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2024**

No	Unit Kerja	Capaian IKU (%)
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	80,95
2	Direktorat Ikan Air Tawar	100
3	Direktorat Ikan Air Laut	88,57
4	Direktorat Rumput Laut	74,07
5	Direktorat Ikan Air Payau	100

Upaya yang harus dilakukan pada periode berikutnya dalam mengoptimalkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%), yaitu mengupayakan langkah tindak lanjut terkait dengan hasil

pemantauan Inspektorat Jenderal yang disampaikan melalui Surat T.918/ITJ.3/HP.550/X/2024, 6 Oktober 2024 mengenai Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan III TA 2024 yang didalamnya menginformasikan bahwa adanya sisa temuan yang tercantum pada LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 di Satker Direktorat Ikan Air Laut dengan sisa sebanyak satu temuan dengan satu saran dan nilai keuangan sebesar Rp41.426.478,00 belum dilengkapi dengan bukti dukung.

Sampai dengan saat pemantauan 30 September 2024, Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan (Dir. Ikan Air Laut) belum melengkapi bukti dukung yang dimaksud sehingga upaya yang harus dilakukan yaitu melakukan telaah/kajian atas sisa temuan pada LHP yang sudah cukup lama dan selanjutnya melakukan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud atau mengajukan status Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti (RTDD) kembali kepada Inspektur III.

#### **IKM.14. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%)**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

**Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut								
Nama Indikator: Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
94	133,33	>120	>120	100	90	94	141,84	148,14

Target IKU Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%) telah ditetapkan di dalam Renstra DJPB 2020- 2024, dengan nilai sebesar 90%. Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup DJPB dilakukan atas (i) tingkat *sharing* dokumen mandatory dengan pembobotan 20%; (ii) tingkat keikutsertaan pejabat dan staf dengan pembobotan 40% serta (iii) tingkat keaktifan unit kerja dalam SI-MP dengan pembobotan 40%.

Pada triwulan III tahun 2024, target indikator Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Laut ditargetkan angka 94 dengan realisasi 133,33 atau sebesar 141,84%. Upaya yang dilakukan terhadap tercapainya target diatas melalui: penyebarluasan informasi menggunakan pladtorm Portal Collaboration Office yang diakses melalui <https://portal.kkp.go.id> (dengan mekanisme dan perhitungan yang disampaikan melalui Memorandum Nomor: 1996/DJPB.1/TU.210/VIII/2023, 30 Agustus 2023 tentang Penyampaian Sosialisasi Manajemen Pengetahuan Periode Triwulan III Lingkup KKP. Penggunaan aplikasi tersebut menggantikan aplikasi Bitrix yang telah habis lisensinya pada tanggal 25 Juni 2023.

Berkaitan dengan perbandingan pencapaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III telah diinformasikan melalui Nota Dinas : 3820/SJ.7/TU.210/IX/2024, 7 Oktober 2024 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Lingkup DJPB Triwulan III Tahun 2024.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Eselon II Direktorat Ikan Air Laut telah melampaui target Indikator Kinerja Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Direktorat Ikan Air Laut (%) dan nilai yang sama juga diperoleh di seluruh unit kerja Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan perolehan 133,33%.

**IKM.15. Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)**

Indikator ini untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis lingkup satker Direktorat Ikan Air Laut, berupa hasil evaluasi data pemanfaatan bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 29. Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut								
Nama Indikator: Capaian Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (%)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2024	Perbandingan Realisasi TW III 2023 thd TW III 2022 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	80	80	-	-

IKU Indikator Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) telah ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 dengan target pada tahun 2023 sebesar 80%. Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Pada Tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penghitungan capaian IKU Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/ strategis lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) merupakan tahunan sehingga capaian pada triwulan II Tahun 2024 belum diketahui.

**IKM.16. Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)**

Indikator kinerja persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Laut (%) merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan tahun 2023, Capaian indikator kinerja tersebut terdiri dari kegiatan arsiparis, rekapitulasi kehadiran pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, layanan tata usaha dan pengelolaan SDM Aparatur. Penghitungan capaian indikator tersebut

diperoleh berdasarkan persentase pengukuran terhadap 6 aspek ketatausahaan dibandingkan dengan jumlah aspek yang diukur setiap triwulannya. Pengukuran dilakukan terhadap 6 aspek dengan bobot pengukuran sebagai berikut:

- Nilai pengawasan arsiparis = 60%
- Kehadiran pegawai = 85%
- Pengelolaan Keuangan = 95%
- Pengelolaan BMN = 95%
- Layanan tata usaha = 73%
- Pengelolaan SDM Aparatur = 72%

**Tabel 30. Capaian Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut								
Nama Indikator: Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
80	99,44	124,3	99,09	100,35	-	80	124,3	-

IKU Indikator Persentase Layanan perkantoran lingkup Direktorat Ikan Air Laut (%) belum ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024. disebabkan Indikator tersebut baru ditetapkan pada tahun 2023 dengan capaian indikator tersebut pada triwulan III tahun 2024 sebesar 99,44%. Perolehan angka capaian tersebut dapat dilihat pada data yang disajikan pada Tabel 31 berikut.

**Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Ikan Air Laut (%) Triwulan III Tahun 2024**

No	Aspek Penilaian	Target (%)	Realisasi (%)
1	Nilai pengawasan arsiparis	60	0
2	Kehadiran pegawai	85	97,75
3	Pengelolaan Keuangan	95	100
4	Pengelolaan BMN	95	100
5	Layanan tata usaha	73	100
6	Pengelolaan SDM Aparatur	72	0
	TOTAL	80	99,44

Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja persentase layanan perkantoran pada Triwulan III tahun 2024, meliputi:

- **Nilai Pengawasan Arsiparis**  
Nilai pengawasan arsiparis diperoleh melalui penilaian jumlah arsip dinamis aktif, arsip in aktif, dan usul musnah. Penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Biro Umum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2023, Direktorat Ikan Air Laut mendapatkan nilai 81,69 dengan predikat memuaskan sementara penilaian pengawasan arsiparis pada Triwulan III belum dilakukan.

- **Kepegawaian**

Aspek ini dihitung berdasarkan kehadiran pegawai lingkup Direktorat Ikan Air Laut. Terdapat penambahan pegawai PNS pada bulan Juni 2024 sebanyak 1 orang sehingga jumlah Pegawai Direktorat Ikan Air Laut pada Triwulan II tahun 2024 sebanyak 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang PNS, 6 (enam) orang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan 7 (tujuh) orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Kehadiran pegawai dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang hadir dibandingkan dengan target kehadiran yang diharapkan, instrumen untuk mengetahui kehadiran pegawai pada Triwulan III tahun 2024 menggunakan aplikasi e-presensi mobile KKP.

**Tabel 32. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024**

No	Tim Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)	Efektif Kerja (Hari)	Target Hadir (OH)	Realisasi Kehadiran			Jumlah	Persentase Kehadiran
					Hadir di Kantor	Dinas Luar	Tugas Belajar		
1	DIREKTUR IKAN AIR LAUT	1	65	65	32	33	0	65	100,00%
2	KAWASAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT	11	65	715	383	275	36	694	97,06%
3	NSPK DAN KELEMBAGAA N BUDI DAYA IKAN AIR LAUT	7	65	455	306	125	0	431	94,73%
4	KESEHATAN DAN LINGKUNGAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT	11	65	715	427	207	65	699	97,76%
5	PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA IKAN AIR LAUT	13	65	845	414	422	0	836	98,93%
6	DUKUNGAN MANAJERIAL	11	65	715	507	199	0	706	98,74%
<b>Total</b>		<b>54</b>		<b>3.510</b>	<b>2.069</b>	<b>1.261</b>	<b>101</b>	<b>3.431</b>	
<b>Persentase (%)</b>									<b>97,75%</b>

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kehadiran masih dibawah dari target kehadiran 100%

yang dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang sakit dan cuti. Gambaran jumlah pegawai yang tidak hadir, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 33. Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024**

No	Kelompok/Bidang	Jumlah Pegawai	Ketidakhadiran (hari)				Jumlah (Hari)	Persentase ketidakhadiran (%)
			Sakit	Cuti	Izin	Alpa		
1	DIREKTUR IKAN AIR LAUT	1	0	0	0	0	0	0,00%
2	KAWASAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT	11	5	16	0	0	21	0,60%
3	NSPK DAN KELEMBAGAAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT	7	2	22	0	0	24	0,68%
4	KESEHATAN DAN LINGKUNGAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT	11	1	15	0	0	16	0,46%
5	PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA IKAN AIR LAUT	13	0	9	0	0	9	0,26%
6	DUKUNGAN MANAJERIAL	11	2	7	0	0	9	0,26%
<b>Total</b>		54	10	69	0	0	79	
							<b>Persentase (%)</b>	<b>2,25%</b>

- **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan pada Direktorat Ikan Air Laut terdiri dari pertanggungjawaban Penggantian Uang Persediaan, Pembayaran LS Bendahara dan Pembayaran LS pihak ketiga. Pada Triwulan III Tahun 2024, pengelolaan keuangan Direktorat Ikan Air Laut dapat dirinci pada Tabel 34.

**Tabel 34. Rincian Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Triwulan III Tahun 2024**

No	Proses Pembayaran	Kuantitas (Dokumen)	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	<b>Jumlah SPM -LS</b>			
	SPM LS Bendahara	116	1.719.630.310	100,00%
	SPM LS Pihak Ketiga	18	41.225.024.888	100,00%
2	<b>Jumlah GUP</b>	0	-	100,00%
3	<b>Jumlah TUP</b>	0	-	100,00%
<b>Jumlah Dokumen Pengajuan Pembayaran</b>		134	42.944.655.198	
<b>Prosentase (%)</b>				<b>100,00 %</b>

- **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**

Pengelolaan BMN Direktorat Ikan Air Laut mencakup pencatatan dan pendetailan BMN serta transaksi keluar pada aplikasi SAKTI Tahun 2024. Data BMN yang dilakukan transaksi keluar antara lain barang persediaan dan barang yang diserahkan ke masyarakat. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 35. Data Transaksi Persediaan Untuk Periode Triwulan III Tahun 2024**

No	Akun	Kuantitas	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
1	Barang Konsumsi (unit)	220	242.000.000	100%
2	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1	109.250.219.000	100%
3	Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1	1.720.500.000	100%
<b>Prosentase (%)</b>				<b>100,00 %</b>

- **Layanan Tata Usaha**

Layanan tata usaha Direktorat Ikan Air Laut yang dihitung sebagai bagian capaian dalam mendukung indikator kinerja persentase layanan perkantoran tahun 2023 berupa layanan yang menunjang penyelenggaraan rapat. Pada Triwulan III tahun 2024, telah direalisasikan kegiatan tersebut dengan rincian pada tabel 36 berikut.

**Tabel 36. Layanan Rapat Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024**

No	Tim Kerja	Permintaan (kali)	Realisasi (kali)	Persentase
1	KAWASAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT	5	5	100,00%
2	NSPK dan KELEMBAGAAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT	2	2	100,00%
3	KESEHATAN DAN LINGKUNGAN BUDI DAYA IKAN AIR LAUT	7	7	100,00%
4	PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA IKAN AIR LAUT	0	0	100,00%
5	DUKUNGAN MANAJERIAL	5	5	100,00%
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	
<b>Persentase</b>				<b>100,00%</b>

- **Pengelolaan SDM Aparatur**

Pengelolaan SDM Aparatur Direktorat Ikan Air Laut dinyatakan dalam Indeks Pengelolaan SDM Aparatur diukur berdasarkan komponen :

- Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Non JF Bidang Perikanan Budidaya, Pindah PNS, Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan Pemberhentian PNS) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah usulan proses mutasi dari unit kerja.
- Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan (Kartu Pegawai, Kartu

Istri, dan Kartu Suami) yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.

c) Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.

Capaian Indeks diatas akan diketahui pada akhir tahun yang pengukurannya dilakukan oleh Bagian Pengelolaan SDM Aparatur- Sesditjen Perikanan Budi Daya.

#### IKM.17. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)

Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) tidak ditetapkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 sehingga indikator tersebut merupakan indikator kinerja yang baru dikelola pada Tahun 2023. Penanggung Jawab Indikator Kinerja tersebut berada di Kelompok Prasarana dan Sarana dan Kelompok Kawasan Bud Daya Ikan Air Tawar.

Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) merupakan Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah mendapatkan kartu KUSUKA secara elektronik. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan) yang dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2024, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2023 (31 Desember 2023).

Perhitungan indikator Perhitungan indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) berdasarkan Jumlah Kusuka yang mendapat bantuan dan terdaftar KUSUKA dibandingkan dengan pelaku usaha budi daya ikan yang menerima bantuan yang hasil pengukurannya baru diketahui pada Triwulan IV.

**Tabel 37. Capaian Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut								
Nama Indikator: Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	-	91	-	-

Target Indikator Persentase Pelaku Usaha Budi daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (%) difokuskan pada kegiatan bantuan pemerintah, berupa: excavator dan PITAP dengan target KUSUKA di masing-masing bantuan pemerintah, yaitu: 120 orang dan 80 orang.

#### IKM.18. Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi)

Indikator kinerja Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%) merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan tahun 2023 sehingga indikator tersebut tidak dicantumkan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024. Seiring dengan adanya

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan pengelolaan data IGT lingkup KKP yang telah dihasilkan.

Indikator kinerja Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh Direktorat Ikan Air Laut yang pengukurannya dihitung berdasarkan jumlah rencana aksi yang diselesaikan dibandingkan dengan total kegiatan rencana aksi yang dipersentasekan. Indikator kinerja tersebut diukur secara tahunan yang seluruhnya telah tercapai sebesar 100%.

**Tabel 38. Capaian Indikator Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (Lokasi) Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut								
Nama Indikator: Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi bidang Perikanan Budi Daya (%)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
-	-	-	-	-	-	1	-	-

**IKM.19. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut (%)**

Indikator kinerja persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Laut didefinisikan sebagai tingkat serapan anggaran di Direktorat Ikan Air Laut. Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut diperoleh berdasarkan persentase realisasi anggaran Direktorat Ikan Air Laut dibandingkan dengan pagu anggaran Direktorat Ikan Air Laut.

Alokasi awal anggaran Direktorat Ikan Air Laut pada tahun 2024 sebesar 429.050.000.000 yang diimplementasikan untuk mencapai Indikator Kinerja di setiap unit kerja yang berada di bawah Direktorat Ikan Air Laut, dengan rincian: (a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp1.350.000.000; (b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 139.200.000.000; (c) Sarana Perikanan Budidaya di UPT sebesar Rp5.800.000.000; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp 1.500.000.000; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp2.500.000.000; (f) Infrastruktur budidaya udang yang ditingkatkan – IISAP sebesar Rp66.600.000.000; dan (g) Budidaya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp212.100.000.000.

Pada bulan Maret 2024 terdapat revisi pagu menjadi Rp418.602.250.000 dengan rincian

(a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp902.250.000 b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 129.200.000.000; (c) Sarana Perikanan Budi Daya di UPT sebesar Rp5.800.000.000; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp 1.500.000.000; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp2.500.000.000; (f) Infrastruktur budi daya udang yang ditingkatkan – IISAP sebesar Rp66.600.000.000; dan (g) Budi daya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp212.100.000.000. Revisi pagu tersebut dimaksudkan untuk realokasi anggaran ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang untuk mendukung pengembangan modelling nila salin.

Pada bulan Juli 2024 terdapat revisi pagu kembali menjadi Rp418.102.250.000 dengan rincian (a) Rekomendasi dan Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan sebesar Rp902.250.000 b) Sarana Kawasan dan Kesehatan Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat sebesar Rp. 128.833.000.000; (c) Sarana Perikanan Budidaya di UPT sebesar Rp5.800.000.000; (d) Klaster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng sebesar Rp 1.500.000.000; (e) Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) sebesar Rp2.367.000.000; (f) Infrastruktur budidaya udang yang ditingkatkan – IISAP sebesar Rp66.600.000.000; dan (g) Budidaya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp212.100.000.000. Revisi pagu tersebut dimaksudkan untuk realokasi anggaran ke Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang untuk mendukung pengembangan modelling nila salin dan Budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) Kebumen untuk mendukung pengembangan budidaya udang berbasis kawasan.

Sejak Januari 2024 hingga saat ini masih terdapat kebijakan blokir anggaran terhadap pagu anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Budi Daya Udang Yang Terintegrasi-ISF sebesar Rp 212.100.000.000 (Rp 50.000.000 dilakukan *Automatic Adjustment* (AA) dan Rp 162.100.000.000 menunggu adanya Loan Agreement sebagai Rupiah Murni Pendamping) dan Infrastruktur Budidaya Udang yang Ditingkatkan – IISAP sebesar Rp100.000.000 sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan. Pagu anggaran Direktorat Ikan Air Laut yang dapat dilaksanakan hanya Rp205.902.250.000.

**Tabel 39. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024**

Nama SS: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Laut								
Nama Indikator: Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut (%)								
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2024 (%)	Target Renstra 2020-2024	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi terhadap Renstra 2020-2024
Target	Realisasi	Capaian						
45	76,28	169,51	57,27	75,08	-	98	77,84	-

**Tabel 40. Capaian Indikator Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024**

No	Output	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran
1	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	902.250.000	485.853.016	416.396.984
2	QEG	Bantuan Peralatan /Sarana	128.833.000.000	121.938.467.094	6.894.532.906
3	RAL	Prasarana Bidang Kemaritiman. Kelautan dan Perikanan	5.800.000.000	5.750.750.000	49.250.000
4	RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman. Kelautan dan Perikanan	70.367.000.000	28.892.187.505	41.474.812.495
Total			Total	205.902.250.000	157.067.257.615
Persentase Realisasi				76,28%	

Capaian Indikator kinerja Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Laut sebesar 76,28% diperoleh dari pelaksanaan kegiatan : (i) **Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan** sebesar Rp 485.853.016 meliputi : NSPK bidang pengendalian residu dan NSPK bidang penyakit ikan, (ii) **Bantuan peralatan/sarana** sebesar Rp 121.938.467.094 berupa excavator yang disalurkan ke masyarakat, dan (iii) **Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan** sebesar Rp 5.750.750.000, antara lain meliputi : (i) Penyusunan DED kawasan tambak, (ii) Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP), (iii) Infrastructure Improvement of Shrimp Aquaculture Project (IISAP) dan (iv) PMO.

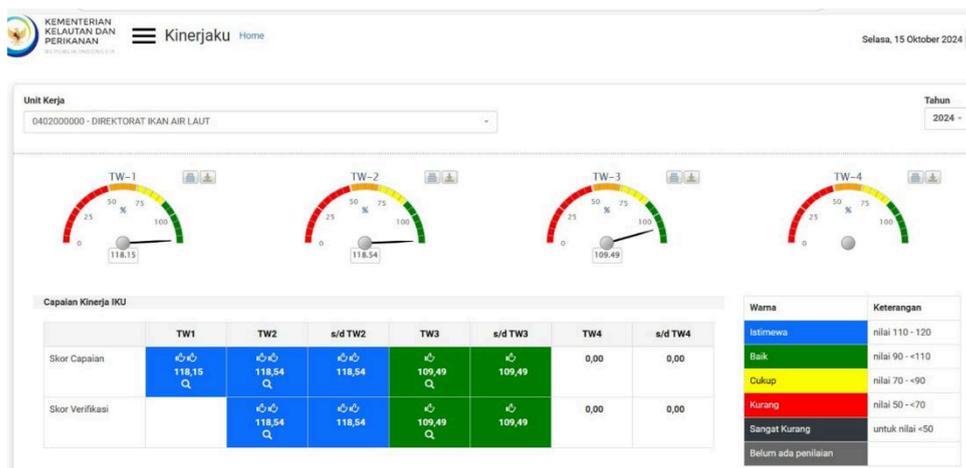
## BAB IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Direktorat Ikan Air Laut merupakan salah satu unit eselon II dilingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan budi daya ikan air laut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Laut berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dan Direktur Ikan Air Laut.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 menyajikan capaian Indikator Kinerja selama periode Juli - September 2024. Selanjutnya terkait dengan capaian Indikator Kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan dalam menilai keberhasilan.

Berdasarkan target tahunan Direktorat Ikan Air Laut tahun 2024, dari total 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja pendukung sasaran strategis, sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja telah melampaui target tahunan yang telah ditetapkan atau >100%, 2 (dua) Indikator Kinerja sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan atau 100%, 1 (satu) Indikator kinerja yang capaiannya dibawah target tahunan dan 12 (dua belas) indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya pada Triwulan III. Seluruh capaian Indikator kinerja Triwulan III Tahun 2024 juga digambarkan melalui Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) pada aplikasi “Kinerjaku” yang memuat capaian Indikator Kinerja pada Triwulan III mencapai nilai angka “Baik”



Gambar 7. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan III Tahun 2024

## B. Saran

Pencapaian nilai kinerja organisasi Direktorat Ikan Air Laut merupakan kontribusi dukungan kinerja dari 5 (lima) Tim Kerja lingkup Direktorat dan *Stakeholder* terkait, sehingga diharapkan agar capaian nilai organisasi yang telah memenuhi target maupun melampaui target tahunan maupun target triwulan III Tahun 2024 dapat dipertahankan pada Triwulan berikutnya.

Kendala dan permasalahan yang ditemui selama pencapaian kinerja organisasi baiknya dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara intensif guna menghasilkan strategi/upaya yang mampu mendorong percepatan pencapaian kinerja. Dukungan seluruh pegawai lingkup Direktorat Ikan Air Laut melalui tercapainya Indikator Kinerja Individu (IKI) yang penilaiannya dilakukan setiap triwulan juga perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024, diketahui bahwa dari 19 (sembilan belas) Indikator kinerja baru 7 (tujuh) Indikator kinerja yang dapat diukur pencapaiannya sedangkan capaian 12 indikator kinerja lainnya belum dapat diukur pada Triwulan III. Sehubungan dengan cara pengukuran masing-masing indikator Kinerja, maka seluruh capaian Tahun 2024 akan diketahui pada Triwulan IV. Adapun permasalahan terkait capaian Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2024 diantaranya:

- a. **Persentase sarana kawasan budi daya yang dimanfaatkan masyarakat (%)**, keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi penerima dan kendala terkait pendaftaran kusuka perorangan/korporasi oleh penyuluh.
- b. **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut (%)**, terdapat 1 (satu) temuan yang tercantum di LHP Nomor R.3221/ITJ/HP.240/VI/2015 belum disertai dengan bukti dukung sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan mengajukan status Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti (RTDD).

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka perlu lakukan upaya tindak lanjut sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan agar tidak menghambat capaian Indikator Kinerja yang telah ditargetkan. Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Laut Triwulan III Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Direktorat Ikan Air Laut sehingga dapat dijadikan titik balik bagi perbaikan kinerja Direktorat Ikan Air Laut pada Triwulan berikutnya.